

KAJIAN CEPAT: PERSPEKTIF MASYARAKAT SIPIL MENGENAI IMPLEMENTASI AGENDA 2030 UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



INFID 2022

**KAJIAN CEPAT:
PERSPEKTIF MASYARAKAT SIPIL
MENGENAI IMPLEMENTASI AGENDA
2030 UNTUK PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN**

INFID 2022

Independent Civil Society Assessment of National Delivery of the SDGs 2030 Agenda Indonesia CSO People Score Card 2022

Disclaimer: Dokumen ini merupakan penilaian independen oleh masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan SDGs 2030 pada tahun 2022 di Indonesia, dengan menggunakan Toolkit People's Scorecard yang disusun oleh Action For Sustainable Development¹.

Penulis Utama

Denisa Amelia Kawuryan

Tim Penulis

Angelika Fortuna Dewi Rusdy
Bona Tua Parlinggomon Parhusip
Grace Joanesa K. Putri
Rinto Leonardo Siahaan
Sugeng Bahagijo

ISBN :

Desain dan Tata Letak:

Diterbitkan oleh:

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

¹https://action4sd.org/wp-content/uploads/2022/02/A4SD-Peoples-Scorecard-Toolkit_2022.pdf

Alamat:

**Jl. Jatipadang Raya Kav. 3 No. 105, Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12540,
Indonesia**

Telepon: +62 21 7819734

Email: office@infid.org

Laman: www.infid.org

Instagram: https://www.instagram.com/infid_ID/

Facebook: <https://www.facebook.com/infid/>

Youtube: <https://www.youtube.com/user/infidjakarta>

Cetakan Pertama, September 2022



RINGKASAN EKSEKUTIF

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bekerjasama dengan Action for Sustainable Development (A4SD) menyusun laporan “People Scorecard” untuk memberikan gambaran implementasi dan tren keseluruhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia dari perspektif masyarakat sipil.

Riset menggunakan *Rapid Assessment Procedures (RAP)*, sesuai *Toolkit People’s Scorecard* yang disusun oleh Action For Sustainable Development. Riset berpusat pada 10 indikator yang bertujuan untuk mengukur persepsi kolektif dan agregat dari proses implementasi SDGs oleh koalisi masyarakat sipil yang berpusat pada tiga bidang utama yaitu kebijakan publik, kapasitas kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Riset disusun melalui tiga langkah utama yaitu a) Survei online; b) Diskusi Terfokus; dan c) Ulasan Ahli. Survei online diisi oleh 66 responden. 47% yang mengisi adalah perempuan dan 53% lainnya adalah Laki-Laki. Apabila dilihat dari perannya, 52% yang mengisi adalah pengambil kebijakan dalam organisasi, yaitu Direktur Eksekutif, Pendiri dan Koordinator Nasional, sementara 48% diantaranya adalah pelaksana program. Sementara diskusi terfokus diikuti oleh 5 lembaga masyarakat sipil (CSO) yang dilakukan secara daring pada tanggal 11 Agustus 2022. Untuk ulasan ahli dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2022 dengan mengundang 1 ahli dari pakar penelitian dan 2 Perwakilan Masyarakat Sipil.

Secara keseluruhan, kemajuan upaya pencapaian 17 SDGs di Indonesia menurut CSO yaitu 39 atau masuk dalam kategori “Kemajuan Rendah”. Pencapaian ini lebih rendah apabila dibandingkan penilaian People’s Scorecard tahun lalu, dimana Indonesia berada dalam kategori “Medium”. Rencana Aksi SDGs, Strategi & Anggaran mendapatkan penilaian paling tinggi (45). Pencapaian ini disusul oleh implementasi di tingkat nasional (43) dan kerangka kebijakan (42). Disisi lain, Indonesia masih perlu mendorong monitoring dan evaluasi yang mendapatkan nilai terendah yaitu 32. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat gap antara rencana aksi dan proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan.

Dalam konteks kebijakan, Pemerintah baru saja menyelesaikan Rencana Aksi Nasional SDGs 2021-2024 yang melibatkan 132 institusi, Rencana Aksi Daerah (RAD) di 31 dari total 37 provinsi serta regulasi terbaru untuk mendorong SDGs di tingkat desa melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pencapaian SDGs.

Dalam periode 2019-2021, mayoritas kebijakan (UU, INPRES, PERPRES) yang disusun untuk mendorong walaupun tidak eksklusif pilar pembangunan sosial (1, 2, 3, 4, 5) sebanyak 13 buah, diikuti pilar pembangunan lingkungan (6, 11, 12, 13, 14, 15) sebanyak 6 buah, pilar pembangunan ekonomi (7, 8, 9, 10, 17) sebanyak 4 buah, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola (16) sebanyak 3 buah. Khususnya dalam pilar lingkungan, kebijakan yang dihasilkan kurang konsisten untuk menahan suhu bumi dibawah 1,5 derajat celcius sesuai Perjanjian Paris yang telah diratifikasi dalam hukum nasional UU Nomor 16 Tahun 2016.

Berdasarkan tren data capaian 19 indikator yang ditinjau, 13 indikator mengalami kemajuan (hijau), sedangkan 6 lainnya mengalami kemunduran (merah). Walaupun tidak dapat mewakili 280 indikator SDGs Indonesia, masih perlu dibuktikan secara kuantitatif korelasi satu tujuan dengan tujuan lainnya, dan belum menggambarkan kondisi kelompok rentan dengan data terpilah, setidaknya data ini memberikan informasi bahwa kebijakan pemerintah selama 5 tahun belakangan telah berdampak terhadap kemajuan beberapa indikator SDGs secara positif dan negatif (trade off).

Apabila ditinjau per tujuan, tujuan yang mendapatkan nilai paling tinggi menurut responden adalah tujuan 4 (46) dan tujuan 5 (45). Sementara tujuan yang mendapatkan nilai paling rendah adalah tujuan 10 (31) dan tujuan 7 (34)

Dalam implementasinya, walaupun tetap ada berbagai tantangan, Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam angka partisipasi pendidikan. Indonesia juga baru mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), hasil kerjasama berbagai pihak selama 10 tahun pada sidang paripurna DPR RI ke-19 pada April 2022.

Sementara di satu sisi, kemajuan dalam sektor energi dan isu ketimpangan perlu komitmen yang lebih kuat. Pemerintah Indonesia dinilai tidak ambisius

dalam menurunkan emisi karbon dan transisi energi baru terbarukan (EBT) karena ketergantungan yang tinggi terhadap batu bara. Ketimpangan pendapatan di Indonesia juga semakin melebar, walaupun pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, angka pengangguran dan gini index Indonesia sudah mulai membaik seiring dengan meningkatnya mobilitas dan konsumsi masyarakat pasca COVID-19 yang melandai.

Menyisakan delapan tahun, kerjasama multipihak untuk mendorong SDGs perlu diperkuat. Keterlibatan CSO dalam kebijakan dan implementasi SDGs bersama pemerintah memiliki variasi yang berbeda. Selain itu, inisiatif SDGs seakan-akan dijalankan sendiri-sendiri dari tiap institusi baik pemerintah, bisnis, akademisi dan CSO tanpa ada kolaborasi yang bermakna dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan kuesioner, 82% responden menganggap terbatasnya informasi untuk terlibat menjadi hambatan untuk mendorong implementasi SDGs. Hambatan lainnya yaitu anggaran (76%), Advokasi kebijakan dengan pemerintah (70%), Pengumpulan data dan money (55%) serta pengetahuan mengenai SDGs (30%)

SDGs di satu sisi telah membantu menstruktur kerja CSO, serta menjadi sumber legitimasi dan peluang memperkuat kolaborasi multipihak untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Beberapa diantaranya pemetaan partisipatif masyarakat adat berbasis gender oleh Perempuan AMAN, pemberdayaan disabilitas oleh HWDI, membantu pemerintah daerah untuk mengintegrasikan SDGs dalam RPJMD oleh Migrant CARE Jember, mengurangi *Stunting* dengan pendekatan berbasis gender oleh Kalyanamitra serta memastikan perlindungan jurnalis dan akses terhadap data oleh AJI.

Berbagai inisiatif masyarakat sipil di Indonesia bahkan sebelum SDGs diadopsi menggambarkan semangat untuk mendorong SDGs tidak sekedar hanya "*business as usual*". Namun, beberapa tahun belakangan, pencapaian SDGs cenderung stagnan dan involutif. Harapannya inisiatif yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil tidak menurun namun bisa di rekognisi, dirawat, dipublikasikan, dan di *scale up* untuk memastikan transformasi pembangunan yang menyoar kelompok rentan/terdampak.

Responden menilai bahwa kelompok rentan dan *left behind* diasosiasikan

pada kelompok anak-anak. Menurut responden, 66% Anak-anak rentan dan tertinggal dalam pembangunan, diikuti perempuan dan anak perempuan (62%) dan penyandang disabilitas (58%). Dalam mekanisme HAM internasional untuk Indonesia, perempuan dan anak perempuan serta anak-anak juga mendapatkan rekomendasi terbanyak yaitu 273 dan 213 secara berurutan.

REKOMENDASI

1. Berdasarkan kuesioner, responden masyarakat sipil meminta agar pemerintah dapat fokus untuk merevisi/memperbaiki Kerangka Regulasi untuk mengakselerasi SDGs (92%), Kolaborasi Multipihak (86%), Budget (83%), Inklusivitas (67%), dan Komunikasi Publik SDGs (64%)
2. Pemerintah diharapkan melakukan review dan menghapus undang-undang, peraturan, dan praktik-praktik kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta mendiskriminasi dan merepresi kelompok warga rentan
3. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan koherensi kebijakan SDGs antar K/L baik di tingkat nasional dan daerah dengan menyadari pentingnya bekerja secara sinergis, memahami konteks, mengidentifikasi konsekuensi negatif yang tidak diinginkan, dan secara efektif mengelola *trade-off* yang tidak dapat dihindari di seluruh SDGs.
4. Pemerintah diharapkan dapat menguatkan peran pemerintah daerah baik secara formal dan material untuk mengakselerasi implementasi SDGs di tingkat daerah
5. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Kementerian/Lembaga tingkat pusat dan daerah mengenai SDGs, khususnya dalam penyusunan kebijakan dan budget yang efektif, partisipatif, berkelanjutan, berperspektif HAM, dan berpihak kepada kelompok rentan/terdampak.
6. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerjasama multipihak secara sinergis, bermakna dan terpadu dengan melibatkan lembaga non pemerintah, sejak dalam tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi kebijakan. Di satu sisi, CSO diharapkan lebih konsisten untuk mendorong pencapaian SDGs di Indonesia dengan secara aktif terlibat dalam kerjasama multipihak

7. Pemerintah diharapkan dapat mengubah cara pandang/norma terhadap kelompok minoritas dengan memberikan upaya khusus, baik dalam bentuk kebijakan ataupun anggaran. Misalnya dengan memperluas praktik baik yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu pemberian E-KTP untuk transgender perempuan (transpuan)
8. Pemerintah perlu meningkatkan ketersediaan dan kualitas data valid terpilah mengenai Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)
9. Mendorong Pengesahan Peraturan Presiden untuk Dana Abadi CSO (*Endowment Fund*) yang dilakukan secara transparan, profesional dan akuntabel agar pendanaan dapat diakses oleh CSO untuk mendorong implementasi SDGs
10. Melakukan komunikasi publik yang terkoordinasi, masif dan menyesuaikan konteks lokal untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai SDGs dan membuat masyarakat aktif terlibat dalam prosesnya
11. Memetakan kemajuan dan praktik baik yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah untuk kemudian ditampilkan dalam website SDGs Indonesia dan diberikan insentif serta dukungan agar inisiatif baik dapat memberikan inspirasi dan di *scale up* secara masif
12. Mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan komitmen negara G20 untuk mengakselerasi pencapaian SDGs dalam Presidensi G20 Indonesia
13. Memastikan pemahaman dan komitmen terhadap SDGs dijadikan tolak ukur untuk memilih kandidat presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta anggota DPD RI dalam Pemilihan Umum 2024

ACKNOWLEDGMENTS

Laporan People's Scorecard 2022 ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan penuh dari Direktur Eksekutif INFID, Sugeng Bahagijo.

Selain itu, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk keterlibatan dalam pengumpulan dan validasinya kepada para ahli dan jaringan organisasi masyarakat sipil serta anggota INFID di seluruh Indonesia, di antaranya: Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Perempuan AMAN, Aliansi Jurnalis Indonesia, Migrant CARE Jember, Kalyanamitra, dan yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Kami juga berterima kasih kepada tim People's Scorecard regional dan global, Prof. Anselmo Lee dan Oli Henman, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan hingga laporan 2022 ini dapat terselesaikan.

Tim Penulis INFID

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	VI
REKOMENDASI	X
ACKNOWLEDGMENTS	XII
DAFTAR ISI	XIII
LIST OF FIGURES	XV
DAFTAR SINGKATAN	XVII
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Background	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Metode	3
1.3.1 Skala Penilaian	6
1.3.2 Kelebihan dan Keterbatasan Riset	6
BAB 2 LITERATURE REVIEW	9
BAB 3 TEMUAN DAN ANALISIS	15
3.1 Analisa Berdasarkan 10 Indikator Penelitian	15
3.1.1 Parameter Kebijakan Publik	16
3.1.2 Parameter Kapasitas Kelembagaan	20
3.1.3 Parameter Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif	22
3.1.4 Prinsip Leave No One Behind dalam Implementasi SDGs	30
3.2 Analisa Per Pilar	33
3.2.1 Pilar Pembangunan Sosial	35
3.2.2 Pilar Pembangunan Ekonomi	43
3.2.3 Pilar Pembangunan Lingkungan	47
3.2.4 Pilar Hukum dan Tata Kelola	50
BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	55

REFERENSI	60
LAMPIRAN 1 INDONESIA DALAM INTERNATIONAL RANKING	64
LAMPIRAN 2 PEDOMAN PENILAIAN PEOPLE'S SCORECARD 2022	65

LIST OF FIGURES

FIGURE 1. CSO RESPONDEN BY WORKING AREA	5
FIGURE 2. NUMBER OF CSO INVOLVED IN THE ISSUE	5
FIGURE 3. SDGS SCORE PER INDICATORS ON PSC INDONESIA 2022	15
FIGURE 4. COHERENCE OF NAWACITA (PRESIDENT'S VISION AND MISSION), 7 NATIONAL DEVELOPMENT PLAN AND SDGS	16
FIGURE 5. 13 SDGS INDICATORS THAT ARE PROGRESSING AND REGRESSING	17
FIGURE 6. PSC KNOWLEDGE ABOUT SDGS NATIONAL ACTION PLAN AND LOCAL ACTION PLAN	21
FIGURE 7. PSC SDGS IMPLEMENTATION CONSTRAINTS	27
FIGURE 8. SDGS BEST PRACTICE: ENGENDERING PARTICIPATORY MAPPING (EPM) BY PEREMPUAN AMAN	30
FIGURE 9. PSC VULNERABLE GROUPS ARE LEFT BEHIND IN THE IMPLEMENTATION OF INDONESIA'S SDGS	30
FIGURE 10. RECOMMENDATIONS OF THE INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS MECHANISM FOR INDONESIA LINKED TO MULTIPLE RIGHTSHOLDER GROUPS	31
FIGURE 11. INDONESIA PSC 2022: SDGS SCORE PER GOALS	34
FIGURE 12. PSC SDGS SCORE FOR SOCIAL DEVELOPMENT PILLAR	35
FIGURE 13. POLICIES TO PROMOTE THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES	36
FIGURE 14. PROPORTION OF POPULATION IN EXTREME POVERTY 2019-2021	37

FIGURE 15. SDGS BEST PRACTICE: VILLAGES STRUGGLE AGAINST STUNTING (SDGS VILLAGE BEST PRACTICES)	41
FIGURE 16. PSC SDGS SCORE FOR ECONOMIC DEVELOPMENT PILLAR	43
FIGURE 17. POLICIES TO PROMOTE THE QUALITY OF ECONOMY	44
FIGURE 18. GDP GROWTH, POVERTY, UNEMPLOYMENT RATE AND INEQUALITY (BPS/STATISTICS INDONESIA)	44
FIGURE 19. INCOME DISTRIBUTION OF THE TOP 10% AND BOTTOM 50% IN INDONESIA (2001-2021)	46
FIGURE 20. PSC SDGS SCORE FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT PILLAR	47
FIGURE 21. POLICIES TO PROMOTE SUSTAINABLE NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENTAL	48
FIGURE 22. PSC SDGS SCORE FOR LAW AND GOVERNANCE DEVELOPMENT	50
FIGURE 23. POLICIES TO PROMOTE LEGAL CERTAINTY AND GOVERNANCE PROCESSES	51
FIGURE 24. RECOMMENDATIONS OF THE INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS MECHANISM FOR INDONESIA LINKED TO SDGS	51

DAFTAR SINGKATAN

A4SD	: Action for Sustainable Development
ADB	: Asian Development Bank
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CAT	: Climate Action Tracker
CRPD	: The Convention on the Rights of Persons with Disabilities
CSO	: Civil Society Organization
Disnakertrans	: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DOB	: Daerah Otonomi Baru
DUDI	: Dunia Usaha dan Dunia Industri
HAM	: Hak Asasi Manusia
HDI	: Human Development Index
HLPF	: High-Level Political Forum
INFID	: International NGO Forum on Indonesian Development
Inpres	: Instruksi Presiden Republik Indonesia
IPK	: Indeks Persepsi Korupsi
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
PMT	: Pemberian Makanan Tambahan
PPP	: Public Private Partnership

PRA	: Participatory Rural Appraisal
RAD	: Rencana Aksi Daerah
RAN	: Rencana Aksi Nasional
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
SDC	: Skill Development Center
SDGs	: Sustainable Development Goals
SIO	: SDG Indonesia One
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLA	: Sustainable Livelihood Approach
SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
UNFCCC	: United Nations Framework Convention on Climate Change
UPR	: Universal Periodic Review
UU TPKS	: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
VNR	: Voluntary National Review
WIR	: World Inequality Report



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Background

Setelah tujuh tahun berjalan, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) membutuhkan perhatian yang serius. Berdasarkan *The Sustainable Development Report 2022*, dunia tidak berada di jalur yang seharusnya untuk mendorong implementasi SDGs, atau dengan kata lain tidak “*on track*”. Selama dua tahun berturut-turut, dunia tidak lagi membuat kemajuan dalam indeks SDGs. Hal ini adalah kemunduran besar, terutama karena sebelum pandemi (periode 2015-2019), indeks kemajuan SDGs meningkat walaupun lambat sebesar 0,5 poin per tahun²

Laporan Kemajuan SDGs Asia dan Pasifik 2022 juga memperkuat bukti bahwa pencapaian SDGs semakin jauh dari jangkauan. Yang mengejutkan, kawasan Asia-Pasifik tidak akan memenuhi target hingga tahun 2065 jika tren saat ini terus berlanjut.

Sebagai salah satu dari 193 negara yang telah mengadopsi SDGs pada tahun 2015, Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang kuat untuk mendorong implementasi SDGs yaitu **Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan** dan Peta Jalan TPB/SDGs yang didorong tidak hanya oleh pemerintah namun juga multipihak termasuk koalisi masyarakat sipil. Di tingkat daerah, upaya pencapaian TPB telah dilakukan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi dan integrasi instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang selaras dengan TPB ke dalam RPJMD.

Sayangnya, regulasi yang kuat belum didukung dengan implementasi nyata yang mumpuni untuk mencapai target ambisius dan merangkul kelompok yang paling terpinggirkan. Kebijakan pembangunan yang kontradiksi dengan pencapaian SDGs, informasi keterlibatan yang tidak merata, komitmen multipihak yang bervariasi, gap pendanaan yang tinggi

²SDSN. (2022, June 2). *Sustainable Development Report 2022*. Retrieved from Sustainable Development Report: <https://www.sdgindex.org/reports/sustainable-development-report-2022/>

adalah beberapa dari masalah yang membutuhkan perhatian khusus untuk mendorong pelaksanaan SDGs yang tidak *business as usual*.

Dengan menyisakan delapan tahun lagi, kemitraan multipihak perlu dipupuk untuk menemukan ide baru dan *scale up* inovasi yang telah terbangun untuk mengakselerasi pencapaian SDGs.

Selain pemerintah, bisnis, akademisi dan media, salah satu aktor penting dalam kerangka multipihak tersebut adalah organisasi masyarakat sipil/*Civil Society Organizations (CSO)*. CSO memiliki peran kunci untuk meningkatkan kesadaran, menjaga prioritas pemerintah terhadap implementasi komitmen dan menyerukan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaannya. CSO telah berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan Agenda 2030, terutama dalam meminta pertanggungjawaban para pemimpin atas komitmen yang telah mereka setujui.

Untuk memastikan penyampaian Agenda 2030 yang efektif, pemerintah berkomitmen pada proses tindak lanjut dan peninjauan yang “kuat, sukarela, efektif, partisipatif, transparan, dan terintegrasi”; dan bahwa pemantauan dan akuntabilitas kemajuan akan dilakukan dengan “data berkualitas tinggi, tepat waktu, dan dapat dipercaya yang dipilah berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, usia, ras, etnis, status migrasi, disabilitas, lokasi geografis, dan karakteristik lain yang relevan dalam konteks nasional” (SDG 17.18).

Sesuai dengan Road Map 2030 dan arahan global, CSO adalah salah satu pemangku kepentingan utama dalam mendorong implementasi dan memonitor pelaksanaan SDGs. Untuk memastikan tujuan tersebut tercapai, ada kebutuhan kritis untuk melibatkan berbagai CSO dalam proses peninjauan dan menemukan cara-cara inovatif agar semua suara dapat didengar, termasuk melalui People Scorecard.

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) kemudian bekerjasama dengan Action for Sustainable Development menyusun laporan “People Scorecard” untuk memberikan gambaran implementasi dan tren keseluruhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia dari perspektif masyarakat sipil. Mekanisme ini penting, karena sesuai prinsip SDGs yaitu multipihak dan “*leaving no one behind*”, proses ini berupaya melibatkan berbagai kelompok masyarakat sipil untuk mengevaluasi, mendukung dan menemukan cara inovatif dalam mendorong pencapaian

SDGs di Indonesia.

1.2 Tujuan

Proses penyusunan People's Scorecard 2022 ini bertujuan untuk:

1. Memberikan platform bagi organisasi masyarakat sipil untuk meninjau secara inklusif pengarusutamaan dan integrasi Agenda 2030 dan 17 SDGs dalam kebijakan dan implementasi nasional, dengan fokus pada tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: sosial, lingkungan dan ekonomi
2. Untuk menyoroti praktik baik dari implementasi SDGs di Indonesia
3. Untuk mengidentifikasi dan memastikan bahwa kelompok rentan dan terpinggirkan menerima manfaat dan terlibat dalam implementasi SDGs

1.3 Metode

Riset menggunakan metode *Rapid Assessment Procedures (RAP)*, sesuai *Toolkit People's Scorecard* yang disusun oleh Action For Sustainable Development. RAP adalah penelitian kualitatif intensif berbasis tim dengan menggunakan triangulasi, analisis data berulang, dan pengumpulan data tambahan untuk dengan cepat mengembangkan pemahaman awal tentang suatu situasi dari perspektif internal (Encyclopedia of Social Measurement, 2005).

Kajian riset berpusat pada 10 indikator yang bertujuan untuk mengukur persepsi kolektif dan agregat dari proses implementasi SDGs oleh koalisi masyarakat sipil yang berpusat pada tiga bidang utama yaitu kebijakan publik, kapasitas kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Dalam parameter kebijakan publik, dua indikator yang diukur yaitu a) Rencana Pembangunan Nasional untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Strategi & Anggaran dan b) Kerangka kebijakan dan hukum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam parameter Kapasitas Kelembagaan, tiga indikator yang diukur yaitu a) Lembaga dengan mandat yang jelas, b) Implementasi di tingkat nasional, c) Implementasi di tingkat sub-nasional (daerah).

Dalam parameter tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif, 5 indikator yang diukur yaitu a) Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

b) Transparansi & Akuntabilitas, c) Kesadaran Publik & Pengembangan Kapasitas, d) Kemitraan Multipihak, e) Partisipasi Masyarakat Sipil.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti melalui survei online dan diskusi terfokus. Sedangkan data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari data BPS atau Kementerian/Lembaga, riset sebelumnya, dokumen pemerintahan, berita dan lain-lain.

Tahapan riset sebagai berikut:

Pertama, Pengumpulan respon survei online oleh masyarakat sipil melalui *cognito* dibuka dari 15 Juli 2022 hingga 27 Juli 2022. Kuesioner global mulanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan disesuaikan dengan konteks implementasi SDGs di dalam negeri. Setelah kuesioner dicoba dan dianggap sesuai, informasi kuesioner dibagikan melalui email dan secara luas melalui group koordinasi CSO. Untuk menggali sebanyak-banyaknya pendapat CSO Indonesia mengenai SDGs, pemilihan responden CSO dilakukan secara *convenience dan* bersifat sukarela dengan persetujuan yang diperoleh sebelum pengisian kuesioner.

Untuk meminimalisir bias, setiap CSO diharapkan memilih satu atau lebih dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang paling sesuai dengan fokus kerja lembaga. Responden diminta untuk memberikan jawaban singkat mengenai implementasi SDGs dan praktik baik serta memberikan skor dari -5 hingga +5 untuk 10 indikator yang ditinjau. Nilai yang terkumpul kemudian di kategorisasi berdasarkan indikator, dan di persentasekan sesuai skala penilaian. Sementara data yang bersifat deskriptif digunakan untuk mengelaborasi dan memperdalam riset.

Selama 9 hari, kuesioner diisi oleh 66 responden dari 66 lembaga CSO. 47% yang mengisi adalah perempuan dan 53% lainnya adalah Laki-Laki. Apabila dilihat dari perannya, 52% yang mengisi adalah pengambil kebijakan dalam organisasi mereka yaitu sebagai direktur eksekutif, pendiri dan koordinator nasional, sementara 48% diantaranya adalah pelaksana program.

Secara kelembagaan, CSO yang berpartisipasi dalam kuesioner bekerja di 34 dari 37 provinsi di Indonesia, dengan mayoritas atau 25 organisasi bekerja di tingkat nasional, disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah yang keduanya

didukung oleh 12 lembaga. Tiga daerah yang belum difasilitasi dalam riset ini yaitu tiga provinsi baru sesuai tiga undang-undang tentang pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) di Papua yang disahkan oleh DPR pada 30 Juni 2022, yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan.



Figure 1. CSO Responden by working area

Mayoritas atau 69.6% dari responden CSO bekerja untuk isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi, 45% bekerja untuk isu kelompok rentan serta Ekonomi, Ketimpangan dan Kemiskinan. Sementara, responden CSO paling sedikit bergerak untuk isu keagamaan

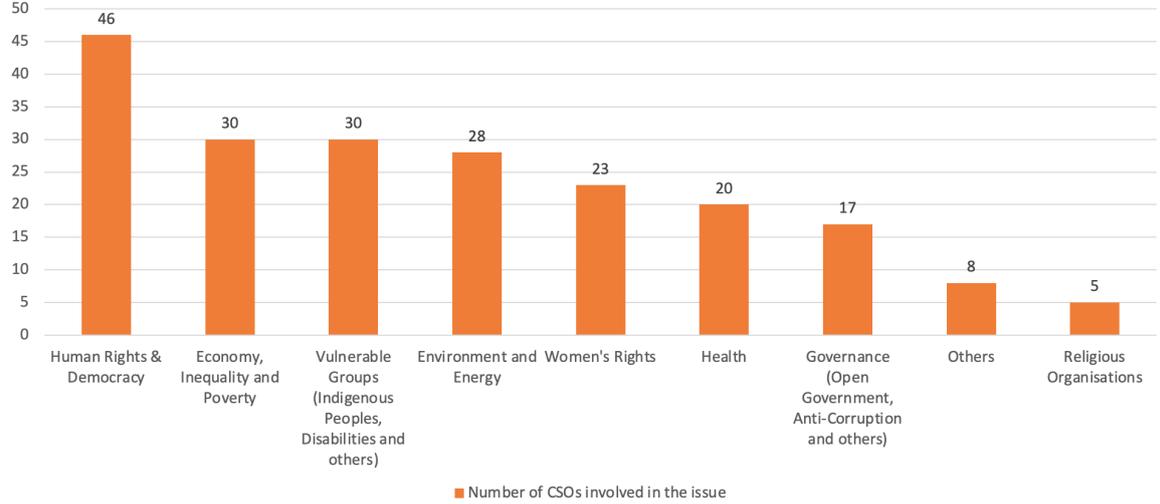


Figure 2. Number of CSO involved in the issue

Kedua, penggalan data yang lebih mendalam dengan diskusi terfokus (FGD), dilaksanakan pada 11 Agustus 2022, dengan dihadiri oleh lima pakar dari CSO nasional dan lokal, untuk mengkonfirmasi hasil skoring yang telah

dihasilkan dari survei.

Ketiga, ulasan ahli dilaksanakan secara online pada tanggal 25 Agustus 2022 dengan mengundang 1 ahli dari BRIN dan 2 Perwakilan Masyarakat Sipil. Ulasan ahli ini ditujukan untuk finalisasi skor dan memperdalam riset.

1.3.1 Skala Penilaian

1. 0 hingga 20% - Kemajuan Sangat Rendah (Antara 0 dan 1 poin berdasarkan skala survei Scorecard)
2. 21% hingga 40% - Kemajuan rendah (Antara 1 dan 2 poin berdasarkan skala survei Scorecard)
3. 41% hingga 60% - Kemajuan sedang (Antara 2 dan 3 poin berdasarkan skala survei Scorecard)
4. 61% hingga 80% - Kemajuan tinggi (Antara 3 dan 4 poin berdasarkan skala survei Scorecard)
5. 81% hingga 100% - Kemajuan yang sangat tinggi (Antara 4 dan 5 poin berdasarkan skala Survei Scorecard)
6. 0% - Tidak ada kemajuan yang dirasakan (0 dalam skala survei Scorecard)
7. -81% hingga -100% - Pengurangan yang sangat besar (Antara -4 dan -5 poin berdasarkan skala Survei Scorecard)
8. -61% hingga -80% - Pengurangan besar (Antara -3 dan -4 poin berdasarkan skala survei Scorecard)
9. -41% hingga -60% - Pengurangan Sedang (antara -2 dan -3 poin berdasarkan skala survei Scorecard)
10. -21% hingga -40% - Pengurangan Kecil (antara -1 dan -2 poin berdasarkan skala survei Scorecard)
11. 0 hingga -20% - Pengurangan Sangat Kecil (Antara 0 dan -1 poin berdasarkan skala survei Scorecard)

1.3.2 Kelebihan dan Keterbatasan Riset

Riset memiliki beberapa kelebihan dan keterbatasan. Metode RAP memungkinkan penggalian cepat informasi yang relevan sebagai bahan untuk advokasi dan komparasi data. Proses pengumpulan data diikuti dengan analisis cepat untuk menentukan prioritas substansi dan memberikan rekomendasi terhadap stakeholder terkait. Riset memperoleh 66 responden dengan lokasi kerja yang luas di 34/37 provinsi di Indonesia, menghasilkan pengetahuan (*generating knowledge*) untuk *closing the gap*

penelitian perspektif masyarakat sipil untuk SDGs serta dapat memetakan responden yang dapat diuji lebih ketat dalam penelitian lebih lanjut.

Di satu sisi, riset memiliki beberapa keterbatasan metodologis. 66 Responden CSO tidak dapat menggeneralisasi pandangan 431.465 organisasi masyarakat di Indonesia (Kemendagri, 2019). Selain itu, karena bertujuan untuk menggali sebanyak-banyaknya pandangan CSO Indonesia, metode *convenience sampling* menyebabkan ketidakseimbangan jumlah atau memungkinkan *underrepresentation* CSO yang bekerja di isu atau wilayah tertentu. Penggalan data secara kuesioner belum ramah disabilitas karena belum ada pendampingan khusus yang diberikan untuk penyandang disabilitas ketika mengisi kuesioner baik secara online maupun manual. Walaupun dalam FGD, peneliti berupaya menyediakan bahasa isyarat dalam prosesnya. Karena keterbatasan waktu dan biaya, riset juga belum mengakomodasi metode wawancara *in-depth interview* untuk menggali lebih dalam suara masyarakat sipil khususnya suara minoritas di Indonesia seperti LGBTIQ, korban pelanggaran HAM masa lalu, pemeluk agama minoritas/aliran kepercayaan dan lain-lain.



BAB 2

LITERATURE REVIEW

Evaluasi dan laporan dalam skala nasional mengenai SDGs disusun oleh Bappenas dalam laporan “Pelaksanaan Pencapaian SDGs 2019.” Laporan komprehensif ini menggarisbawahi capaian dan tantangan untuk setiap 17 tujuan SDGs. Laporan menggambarkan secara makro bahwa separuh (52% atau 146 indikator) dari total indikator (280) telah mencapai target yang ditetapkan pada RAN 2017-2019. Bila ditambahkan 18 persen atau 50 indikator yang menunjukkan tren akan membaik, maka terdapat sekitar 70 persen dari 280 indikator TPB/SDGs yang telah tercapai dan mengalami kemajuan. Sementara itu, 30 persen atau 84 indikator lainnya masih memerlukan perhatian khusus.³

Berfokus kepada tata kelola, Voluntary National Review (VNR) Indonesia 2021 menggambarkan tantangan implementasi SDGs diantaranya 1) Pemusatan upaya untuk mencapai SDGs secara inklusif mulai dari tingkat nasional hingga daerah 2) Kesenjangan pembiayaan yang kian melebar akibat dampak pandemi COVID-19 dan menurunnya penerimaan pajak serta berbagai sumber pendapatan lainnya 3) Pengumpulan data berkualitas khususnya data statistik per sektor yang dikumpulkan oleh kementerian dan lembaga⁴.

Sementara di tingkat daerah, ada beberapa riset yang menggambarkan konsistensi tantangan untuk mendorong implementasi SDGs. Riset INFID (2019) di 8 daerah menemukan ada perbedaan tanggapan dan pemahaman mengenai agenda SDGs di daerah. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan SDGs, informasi mengenai SDGs masih terbatas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah secara umum masih amat awam terhadap SDGs, kecuali di dinas komunikasi dan informasi. Selain itu, pemerintah daerah juga menghadapi

³ Bappenas. (2019). *Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals*. Jakarta: Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

⁴ Republic of Indonesia. (2021). *Indonesia's Voluntary National Review 2021*. Jakarta.

kendala tingginya pergantian kepala SKPD yang menyebabkan internalisasi dan kesinambungan proses RAD terhambat, seperti yang terjadi di Cirebon dan Pangkep. Kendala lain adalah ketersediaan dan koordinasi data di antara SKPD yang masih rendah sehingga mempengaruhi proses penyusunan RAD terutama dalam penetapan indikator dan target.⁵

Aidha, dkk (2019) menemukan bahwa kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SDGs dan pencapaian indikator-indikatornya tidak hanya bertumpu pada keberadaan instrumen seperti Rencana Aksi Daerah atau Kelompok Kerja, melainkan juga ditentukan oleh harmonisasi program pemerintah, pengukuran dan pengawasan, serta pemahaman masyarakat tentang SDGs dan bagaimana cara mencapainya.⁶

Arif Sofianto (2019) dalam riset “Integrasi Target dan Indikator SDGs ke dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Jawa Tengah” juga menemukan bahwa integrasi SDGs ke dalam perencanaan pembangunan daerah menemui banyak tantangan. Beberapa diantaranya a) banyak indikator global maupun nasional yang tidak sesuai dan tidak memiliki data pendukung. Selain itu, ada kesulitan mengumpulkan data dari OPD lain, lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi b) Terjadi penyempitan makna SDGs yaitu hanya sebagai kegiatan Bappeda. Penyusunan RAD juga masih terbatas pada *tagging* program yang ada dalam RPJMD, dan belum mengadopsi program dari non pemerintah provinsi atau kabupaten/kota c) Pemerintah kabupaten/kota dihadapkan pada permasalahan bagaimana mengintegrasikan SDGs ke dalam perencanaan pembangunan daerah, serta bagaimana mensinergikan tuntutan pencapaian SDGs dengan tuntutan politis dari masyarakat, kebutuhan pembangunan daerah dan potensi serta permasalahan daerah. d) Implementasi SDGs di Jawa Tengah juga masih menghadapi masalah pendanaan. Tuntutan program yang ambisius

⁵ INFID. (2019). *Studi Keterbukaan Pemerintah dalam Rangka Mendorong Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Daerah*. Jakarta: INFID. Riset dilakukan di delapan daerah, yaitu Kota Banda Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam), Kabupaten Cirebon (Jawa Barat), Provinsi DI Yogyakarta, Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Jember (Jawa Timur), Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur), Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau Pangkep (Sulawesi Selatan), dan Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur/NTT).

⁶ Aidha, C. N., Mawesti, D., Afrina, E., Rahmanda, N. R., Thariq, M., & Zunivar, A. Y. (2019). *Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Tujuan SDGs No 1, 5 & 10: Baseline Study Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan*. Jakarta: Perkumpulan PRAKARSA <https://repository.theprakarsa.org/media/publications/285240-kapasitas-pemerintah-daerah-dalam-mencap-b1d4b666.pdf>

tidak mampu dipenuhi oleh anggaran pemerintah daerah semata.⁷

Sejalan dengan temuan sebelumnya, Eko Handrian dan Hendry Andry dalam riset *Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian Di Provinsi Riau* (2020) juga menemukan beberapa tantangan dalam penyusunan RAD TPB/SDGs Riau antara lain: Penentuan target capaian masing-masing Indikator SDGs karena data belum/tidak tersedia, penentuan dan justifikasi program, justifikasi penentuan pagu program, belum lengkapnya dokumen perencanaan pada tingkat kabupaten dan adanya mutasi penanggungjawab kegiatan SDGs di tingkat Kabupaten⁸.

Sementara dalam konteks anggaran, riset INFID di 10 daerah⁹ menemukan bahwa meskipun kapasitas dan ruang fiskal daerah masih rendah, bahkan di bawah rerata nasional, namun seluruh daerah yang diteliti memiliki kapasitas fiskal dan prospek ekonomi yang cukup memadai untuk mewujudkan program-program pembangunan daerah. Meski demikian, belanja daerah belum menunjukkan keberpihakannya terhadap pencapaian target-target SDGs. Mayoritas program pembangunan daerah memiliki keterkaitan dengan tujuan SDGs 3, yaitu kesehatan dan diikuti oleh tujuan SDGs 4, yaitu pendidikan. Sementara empat tujuan SDGs yang diteliti lainnya (1,5,8,10) hanya mendapatkan proporsi di bawah 1%. Selain alokasi, efektivitas anggaran perlu dikawal, seperti program-program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang kebanyakan adalah pelatihan-pelatihan dan pemberian bantuan.¹⁰

Selain tantangan di atas, penelitian Pribad (2017) menegaskan bahwa pencapaian SDGs memerlukan upaya kerjasama dan program lokal yang sesuai kebutuhan. Muhammad Fardan Ngoyo (2018) juga menekankan bahwa rakyat perlu diposisikan sebagai subjek yang memiliki seperangkat hak yang harus dipenuhi dan diberikan kuasa untuk memikirkan, menyusun,

⁷Sofianto, A. (2019, June 28). Integrasi Target dan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Jawa Tengah. *Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 17(1), 25-41. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v17i1.784>

⁸ Handrian, E., & Andry, H. (2020, April 13). Sustainable Development Goals : Tinjauan Percepatan Pencapaian Di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87. <https://core.ac.uk/download/pdf/322503307.pdf>

⁹ Provinsi NTT, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Banda Aceh, dan Tujuh Kabupaten (Rejang Lebong, Cirebon, Tuban, Bojonegoro, Jember, Maros, dan Pangkep).

¹⁰INFID. (2019). *Penilaian Fiskal dalam Rangka Pelaksanaan dan Pencapaian SDGs yang Berperspektif Gender, Inklusif, dan Transformatif*. Jakarta: INFID

merencanakan, dan memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai target dan tujuan dalam proses pembangunan (bottom up). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bukanlah sesuatu yang taken for granted yang serta merta harus diikuti tanpa pernah memikirkan bagaimana dampak dan kontribusinya bagi rakyat banyak. Dalam prosesnya, CSO juga diharapkan dapat mengontrol dan memberikan masukan-masukan konstruktif dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang perlu didorong adalah dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Sustainable Livelihood Approach (SLA) sehingga dapat menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat dalam proses pembangunan.¹¹

Asian Development Bank (2020) dalam laporannya “*Reaching the Sustainable Development Goals through Better Local-Level Data*” di satu sisi menemukan bahwa kepemimpinan lokal, kolaborasi lintas sektor, keterlibatan multi-stakeholder, dan kepercayaan penting untuk mendorong implementasi SDGs di tingkat lokal. Berdasarkan pengalaman dalam mengembangkan *dashboard* untuk jaminan kesehatan universal di Davao di Filipina, Asian Development Bank (ADB) mengembangkan *dashboard* di Jawa Timur untuk menyampaikan pesan dan penyebab utama perkawinan anak. Dengan menggunakan pendekatan *open government*, akses terhadap data membuat dialog kebijakan lokal lebih relevan dengan kebutuhan aktual. Hal ini memungkinkan banyak pemangku kepentingan untuk lebih memahami kenyataan, terlibat dalam proses konsultatif sejak dini, dan berkontribusi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.¹²

Beberapa riset dan laporan diatas telah menggambarkan pencapaian, konsistensi permasalahan mengenai koordinasi lintas sektor serta menawarkan solusi untuk mengkaselerasi SDGs di tingkat nasional dan daerah. Walaupun begitu, belum ada riset yang mencoba memberikan evaluasi pencapaian SDGs secara keseluruhan dari perspektif masyarakat sipil secara umum. Banyak kerja-kerja yang telah dilakukan masyarakat sipil

¹¹ Ngoyo, M. F. (2018, March 8). *Mengawal Sustainable Development Goals(SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan*. *Sosioreligius*, 1(1). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/593198>

¹² Asian Development Bank. (2020). *Reaching the Sustainable Development Goals Through Better-Local Level Data*. Manila: Asian Development Bank. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/644236/sdgs-better-local-level-data-indonesia.pdf>

untuk mendorong implementasi SDGs namun, banyak juga kendala yang menghambat kerja-kerja tersebut. Sebagai salah satu aktor penting dalam SDGs, riset tahun kedua yang dilakukan oleh A4SD dan INFID secara publik ini harapannya dapat memetakan pandangan kritis masyarakat sipil secara makro berdasarkan 10 indikator utama untuk mengakselerasi pencapaian SDGs Indonesia.



BAB 3

TEMUAN DAN ANALISIS

3.1 Analisa Berdasarkan 10 Indikator Penelitian

Secara keseluruhan, kemajuan upaya pencapaian 17 SDGs di Indonesia menurut CSO yaitu 39 atau masuk dalam kategori “Kemajuan Rendah”. Pencapaian ini lebih rendah apabila dibandingkan penilaian People’s Scorecard tahun lalu, dimana Indonesia berada dalam kategori “Medium”. Rencana Aksi SDGs, Strategi & Anggaran mendapatkan penilaian paling tinggi (45). Pencapaian ini disusul oleh implementasi di tingkat nasional (43) dan kerangka kebijakan (42). Disisi lain, Indonesia masih perlu mendorong monitoring dan evaluasi yang mendapatkan nilai terendah yaitu 32. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat gap antara rencana aksi dan proses monitoring yang dilakukan.

Salah satu responden menyampaikan

“Kami mengetahui adanya SDGs, namun sepertinya kurang peduli dengan progressnya, karena belum merasakan dampak dan manfaat SDGs secara langsung. Untuk kelompok-kelompok minoritas dan marjinal bahkan belum tersentuh, namun minimal ada wacana untuk menyentuhnya.”

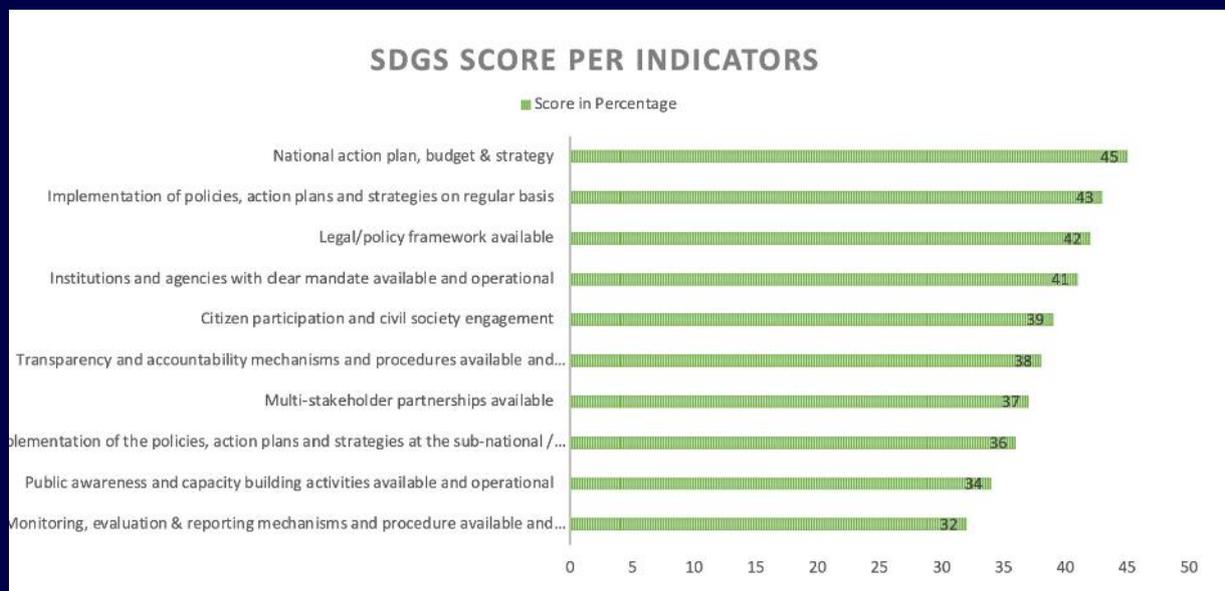


Figure 3. SDGs score per indicators on PSC Indonesia 2022

3.1.1 Parameter Kebijakan Publik

Dalam implementasinya, Indonesia memang telah memiliki Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mendasari penyusunan dokumen turunan diantaranya Roadmap SDGs 2030 dan Rencana Aksi Nasional (RAN) 2021-2024. Selain itu, adopsi TPB di nasional juga telah dilakukan dengan mengintegrasikan 124 target TPB ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2020-2024.



Figure 4. Coherence of Nawacita (President's Vision and Mission), 7 National Development Plan and SDGs

Atas berbagai upaya untuk mendorong implementasi SDGs, berdasarkan **Sustainable Development Report 2022**, komitmen Indonesia untuk mendorong SDGs berada dalam level moderat (50-65). Selain itu, indeks SDGs Indonesia menempati rangking 82 dari 163 negara, naik nilainya dari 68,9 pada tahun 2021 menjadi 69,16 pada tahun 2022. Namun demikian, rangking Indonesia masih jauh tertinggal oleh beberapa anggota ASEAN lainnya seperti Malaysia (72), Singapura (66), Vietnam (55) dan Thailand (44)¹³.

Apabila ditinjau di tingkat nasional, beberapa indikator SDGs menggambarkan pencapaian sebagai berikut:

¹³ SDSN. (2022, June 2). *Sustainable Development Report 2022*. Retrieved from Sustainable Development Report: <https://dashboards.sdgindex.org/rankings>

SDGs' Indicator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Graph	
1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional (Statsthes Indonesia, Per September)	11,13	10,7	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71		Green
2.1.1 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) (Statistics Indonesia)	10,73	8,93	8,23	7,92	7,63	8,34	8,49		Green
3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan (Susenas, Statistics Indonesia, VNR 2021)	4,66	4,33	5,26	4,91	5,18	5,44			Red
4.1.1 (f) Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan SMA (Statistics Indonesia)	52,04	57,47	57,71	61,84	58,33	63,95	65,94		Green
5.5.2 Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial (Statistics Indonesia)	22,32	23,6	26,56	28,75	30,37	33,08	32,5		Green
6.2.1.b Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (Statistics Indonesia)	62,14	67,8	67,89	69,27	77,39	79,53	80,29		Green
7.2.1 *Bauran energi terbarukan (Statistics Indonesia)	4,9	6,27	6,66	8,6	9,19	11,27	12,16		Green
8.2.1 * Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja (Statistics Indonesia)	4,7	1,85	2,8	0,79	3	-1,84	1,64		Red
9.2.1 * Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita (Statistics Indonesia, VNR 2021)	21,54	21,38	21,22	21,04	20,79	20,61			Red
10.1.1 * Gini Index Per September (Statistics Indonesia)	0,402	0,394	0,391	0,384	0,38	0,385	0,381		Green
11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) (BNPB, Laporan SDGs 2019)	169,6	149,4	143,5	135,8	130,4				Green
12.c.1 Percentage of Fossil Fuel Subsidies to GDP (VNR 2021)	0,52	0,35	0,34	0,65	0,53	0,31			Green
13.2.1 Persentase Penurunan Emisi GRK (Bappenas, VNR 2021)	17,42	20,15	20,24	23,84	23,46				Green
14.5.1 * Jumlah luas kawasan konservasi perairan (Juta Ha) Kementerian Kelautan dan Perikanan (VNR 2021)	17,3	17,9	19,14	19,3	23,14	24,11			Green
15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan (%) (Laporan SDGs 2019)	50,78	50,45	50,18	49,8					Red
16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) (Statistics Indonesia, VNR 2021)			3,71	3,66	3,7	3,84			Green
17.1.1 (a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB (Kementerian Keuangan)	10,76	10,36	9,89	10,24	9,77	8,33	9,12		Red
Pertumbuhan GDP (%) (Statistics Indonesia)	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69		Green
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (Statistics Indonesia, Per Agustus)	6,18	5,61	5,5	5,3	5,23	7,07	6,49		Red

Figure 5. 13 SDGs indicators that are progressing and regressing

Berdasarkan tabel pencapaian beberapa indikator SDGs diatas diketahui bahwa 13 indikator mengalami kemajuan (hijau), sedangkan 6 lainnya mengalami kemunduran (merah). Perlu diketahui bahwa 19 indikator tersebut tidak dapat mewakili 280 indikator SDGs Indonesia, masih perlu dibuktikan secara kuantitatif korelasi satu tujuan dengan tujuan lainnya, dan belum menggambarkan kondisi kelompok rentan dengan data terpilah. **Namun demikian, setidaknya data ini memberikan informasi bahwa**

kebijakan pemerintah selama 5 tahun belakangan telah berdampak terhadap kemajuan beberapa indikator SDGs secara positif dan negatif.

Atau dengan kata lain, pencapaian satu tujuan bisa berdampak baik atau buruk terhadap pencapaian tujuan lainnya, sehingga penyusunan kebijakan dengan pertimbangan komprehensif perlu dilakukan. Misalnya, pertumbuhan PDB yang membaik tidak sejalan dengan berkurangnya proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan. Selain itu, semakin banyak masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan pelayanan kesehatannya bisa berdampak negatif terhadap produktivitas sehingga mempengaruhi Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja.

Atas dasar keterkaitan antar tujuan tersebut, perlu ada metode untuk keluar dari penyusunan kebijakan yang silo. Sayangnya, sampai saat ini masing-masing Kementerian/Lembaga cenderung memiliki pola pikir sendiri-sendiri tanpa melihat bahwa apa yang dilakukan juga mempunyai kontribusi terhadap *tujuan* yang lain. **Untuk itu, pengambil kebijakan perlu menyadari pentingnya bekerja secara sinergis, memahami konteks, mengidentifikasi konsekuensi negatif yang tidak diinginkan, dan secara efektif mengelola *trade-off* yang tidak dapat dihindari di seluruh SDGs.** Berdasarkan Tinjauan Nasional Sukarela (VNR), koherensi kebijakan ini memang merupakan salah satu tantangan tersulit untuk mengimplementasikan SDGs.

Selain strategi, budget untuk SDGs masih menjadi catatan. Pasalnya, kebutuhan pendanaan untuk SDGs berdasarkan Bappenas mencapai Rp 67 ribu triliun dengan selisih atau gap kebutuhan pendanaan sekitar Rp 14 ribu triliun. Bahkan, kebutuhan pendanaan SDGs diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 70% dengan menggunakan *benchmark* pendanaan SDGs global akibat pandemi COVID-19¹⁴.

Strategi pembiayaan untuk pencapaian SDGs di Indonesia secara komprehensif diatur dalam *SDGs Roadmap*, mulai dari peningkatan kualitas belanja, peningkatan penerimaan negara, peningkatan peran swasta, hingga pada pendirian SDGs Financing Hub¹⁵. SDGs Financing Hub dikelola

¹⁴ Rabbi, C. P. (2021, December 20). *Pendanaan SDGs Butuh Rp 67 Ribu Triliun, Swasta Diminta Terlibat* Retrieved from Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/maesaroh/berita/61c0467254d98/pendanaan-sdgs-butuh-rp-67-ribu-triliun-swasta-diminta-terlibat>

¹⁵ Sekretariat Nasional SDGs. (n.d.). *Dokumen*. Retrieved from https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf

oleh Bappenas untuk memfasilitasi agar setiap target strategis SDGs bisa terdani dengan berbagai skema pembiayaan yang melibatkan pemerintah, swasta, filantropi, pasar uang, pasar modal dan *blended financing*.

Salah satu inisiatif pemerintah untuk pembiayaan SDGs adalah 'SDG Indonesia One (SIO)', yaitu platform kerjasama pendanaan terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Inisiatif ini diluncurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun 2018. Beberapa proyek berbasis SDGs yang telah didukung melalui *platform* SIO, yakni Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang merupakan sistem penyediaan air *Public Private Partnership* (PPP). Setelah 47 tahun direncanakan, SPAM Umbulan diresmikan pada tahun 2021 dan berpotensi menyediakan air bersih yang dapat diminum bagi 1,3 juta orang warga di Jawa Timur (Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik)¹⁶. Selain itu, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) juga mendanai proyek rumah sakit spesialis kardiologi dan jantung di Sulawesi Tenggara untuk melayani masyarakat dari daerah tersebut dan dari bagian tengah dan timur Indonesia¹⁷

Terlepas dari berbagai inisiatif pembiayaan SDGs dan meningkatnya kesadaran Kementerian/Lembaga untuk mengintegrasikan SDGs dalam rencana kerja, **belum ada dana khusus yang dapat diakses oleh masyarakat sipil untuk mendorong implementasi SDGs**. Survei People Scorecard Implementasi Sustainable Development Goal Indonesia dari Perspektif Masyarakat Sipil (2021) menunjukkan 51,7% responden menyatakan bahwa anggaran menjadi kendala dalam pelaksanaan SDGs. Hal ini kembali diperkuat dengan hal ini diperkuat dengan mayoritas CSO (76%) yang menyampaikan budget menjadi kendala dalam implementasi SDGs yang mayoritas (76%) menyampaikan budget menjadi kendala dalam implementasi SDGs.

¹⁶ Kementerian PUPR. (2020, July 3). *Segera Rampung, SPAM Umbulan Tambah Pasokan Air Bersih Bagi 1,3 Juta Warga Jatim*. Retrieved from Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia: <https://pu.go.id/berita/segera-rampung-spam-umbulan-tambah-pasokan-air-bersih-bagi-1-3-juta-warga-jatim>

¹⁷ Anam, K. (2022, March 14). *PT SMI Akselerasi Proyek Berbasis SDGs Lewat Platform SIO*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220314181731-4-322692/pt-smi-akselerasi-proyek-berbasis-sdgs-lewat-platform-sio>

3.1.2 Parameter Kapasitas Kelembagaan

Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 memberikan mandat kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS untuk mengkoordinasi pengintegrasian SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional. Peran koordinasi tersebut meliputi pengawasan dan evaluasi, pelaporan perkembangan pencapaian target dan indikator SDGs, mendorong ketersediaan anggaran dari sumber-sumber negara dan non-negara, dan pembentukan Tim Koordinasi Nasional SDGs untuk mengarahkan upaya pembangunan di tingkat nasional dan daerah¹⁸.

Sebagai negara desentralisasi, komitmen pusat untuk mendorong SDGs sulit tercapai apabila tidak didukung oleh komitmen pemerintah daerah. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, yang menyatakan berhasil atau tidaknya implementasi pembangunan berkelanjutan akan ditinjau di level daerah¹⁹.

Berdasarkan dokumen RAN SDGs 2020/2024, 31 dari 37 provinsi sudah memiliki Rencana Aksi Daerah. Upaya pencapaian TPB juga telah dilakukan dengan integrasi instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang selaras dengan TPB ke dalam RPJMD. Selain itu, Indonesia telah memiliki Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pencapaian SDGs.

Walaupun begitu, Lokalisasi SDGs mendapatkan nilai paling rendah ketiga (36) dari 10 indikator lainnya. Hal ini sejalan dengan penilaian People's Scorecard tahun lalu yang juga menempatkan lokalisasi SDGs paling rendah ketiga dibandingkan indikator lainnya. Berdasarkan jawaban dari responden, diketahui juga bahwa ada gap pengetahuan untuk rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah, dimana keduanya merupakan mandat dari Perpres SDGs.

¹⁸ Sekretariat SDGs Indonesia. (n.d.). *Struktur Organisasi SDGs di Indonesia*. Retrieved from <https://sdgs.bappenas.go.id/struktur-organisasi/>

¹⁹ United Nations. (2012, April 23). *Our Struggle for Global Sustainability Will Be Won or Lost in Cities*. Retrieved from United Nations: <https://press.un.org/en/2012/sgsm14249.doc.htm>

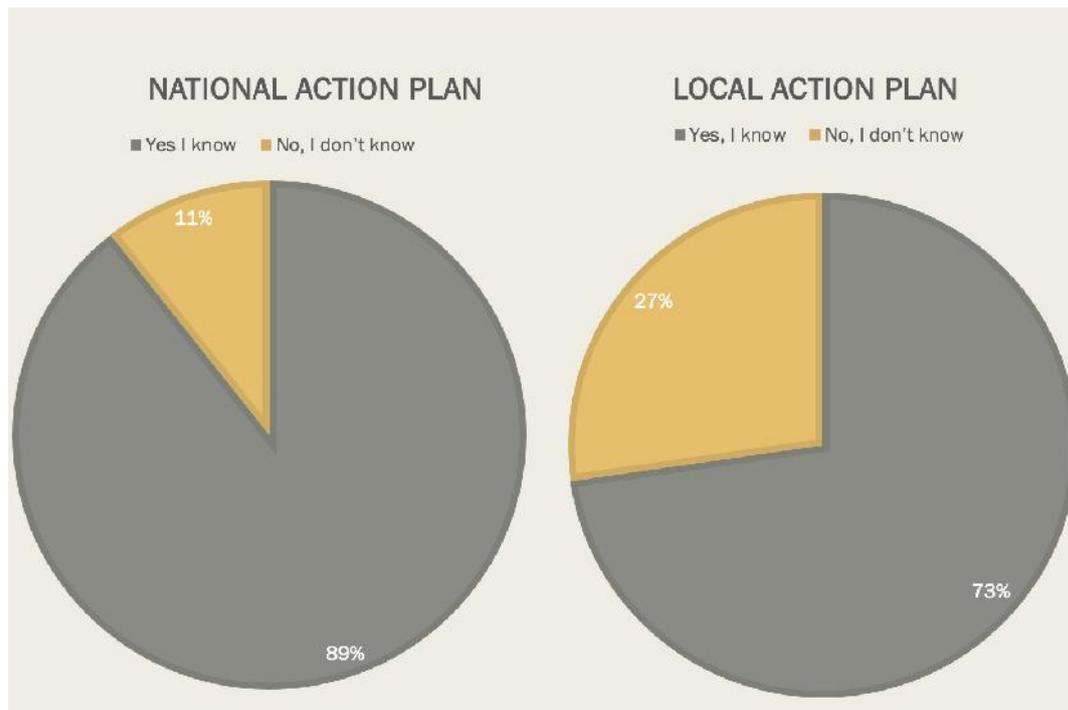


Figure 6. PSC knowledge about SDGs national action plan and local action plan

Merujuk pada *literature review* (Bab 2), memang ada berbagai kendala untuk menyelaraskan SDGs di tingkat daerah mulai dari komitmen, kapasitas, data, koordinasi, partisipasi serta anggaran yang terbatas. Dalam proses sosialisasi, pemerintah harapannya menjelaskan SDGs tidak terbatas pada tujuan, namun juga indikator-indikator yang berhubungan dan relevansinya dengan kondisi daerah. Selain itu, mandat implementasi SDGs hanya sampai level provinsi tidak sampai Kabupaten/Kota. Contohnya di Kabupaten Pematang, Pemerintah sudah menganggarkan penyusunan RAD SDGs, akan tetapi ada wacana kuat untuk dibatalkan karena sesuai ketentuan pemerintah, kabupaten/kota tidak diwajibkan menyusun RAD sebagaimana provinsi²⁰.

Di satu sisi, Indonesia telah membuat komitmen besar untuk mendorong implementasi SDGs sampai ke tingkat Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pencapaian

²⁰ Sofianto, A. (2019, June 28). Integrasi Target dan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Jawa Tengah. *Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 17(1), 25-41. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v17i1.784>

SDGs. Kontribusi SDGs Desa terhadap tujuan pembangunan nasional berkelanjutan mencapai 74%. Angka ini didasarkan pada aspek kewargaan dimana 43% warga Indonesia tinggal di desa (BPS, 2020). Sedangkan, pada aspek kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri tahun 2019 mencatat 91% wilayah Indonesia berada di desa²¹.

Walaupun begitu, peningkatan kapasitas dan sosialisasi SDGs Desa perlu dukungan yang masif agar tidak hanya sekedar jargon, namun benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan catatan beberapa masyarakat sipil, saat ini SDGs Desa mayoritas dipandang sebagai proses pendataan, yaitu mengisi kuesioner oleh pemerintah desa tanpa tahu makna dan tujuan yang sesungguhnya.

“Berdasarkan gambaran pemahaman yang kami temukan (setidaknya di delapan desa), Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa sangat terbatas untuk memahami SDGs Desa terutama jika kita kaitkan dengan goal 5 soal kesetaraan gender dan detail indikatornya. Apabila kita tanya soal data kekerasan, mereka secara lisan akan memberikan gambaran-gambaran bahwa ada kasus namun sayangnya mereka tidak pernah mengarsip itu dengan baik, belum lagi secara kelembagaan tidak ada forum tertentu untuk merespon kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, kasus perkawinan anak, KDRT dan sebagainya”²²

3.1.3 Parameter Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif

Dalam parameter Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif, mayoritas indikatornya mendapatkan nilai kurang baik. Monitoring and Evaluasi (Monev) dan kesadaran publik bahkan mendapatkan nilai paling rendah dibandingkan 8 indikator lainnya yaitu 32 dan 34 secara berturut-turut. Selanjutnya diikuti Kemitraan Multipihak (37), Transparansi dan Akuntabilitas (38) dan Keterlibatan publik dan CSO (39).

Untuk monitoring dan evaluasi di tingkat internasional, Indonesia telah menyusun *Voluntary National Review* (VNR) sebanyak 3 kali (2017, 2019, 2021) dan berencana untuk melakukannya kembali pada tahun 2023. Pada

²¹ Reza, M. (2021, May 10). *SDGs Desa dan Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*. Retrieved from Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: <https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/sdgs-desa-dan-rekonstruksi-paradigma-pembangunan-berkelanjutan/>

²² Hasil dari Diskusi Terfokus pada 11 Agustus 2022

tahun 2017, Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari enam perumus terbaik untuk rencana pembiayaan dan salah satu perumus terbaik untuk Tujuan 16 pada tahun 2019 mengenai data terpilah (White & Case Review of the 2019 VNR).

Di tingkat nasional, berdasarkan dokumen RAN 2021/2024, kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan Pasal 7 butir b Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sedangkan pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs diamanatkan pada Pasal 17, yang menugaskan setiap Menteri/Kepala Lembaga dan Gubernur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional. Dalam proses penyusunannya, Pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, sedangkan organisasi non pemerintah melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self-assessment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self-assessment tool* (SAT) yang disepakati. Laporan tahunan pertama sebagai hasil dari pemantauan dan evaluasi atas progres dan pencapaian TPB/SDGs, yang targetnya ditetapkan pada RAN 2017-2019 telah disusun pada tahun 2019.

Walaupun tidak semua data tersedia, Indonesia juga sudah memiliki data kemajuan pencapaian SDGs yang disusun oleh BPS²³ dan Dashboard SDGs Indonesia didukung oleh UNICEF²⁴ untuk menampilkan capaian indikator pembangunan nasional dan daerah. Namun sayangnya, belum ada platform yang menampilkan moneyv atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah. Padahal, ada berbagai inisiatif baik yang dilakukan oleh masyarakat sipil, bisnis, akademisi dan media yang dilakukan untuk mendorong implementasi SDGs bahkan sampai ke tingkat paling bawah di masyarakat.

²³ https://www.bps.go.id/indikator/indikator/list_/sdgs_1/

²⁴ <https://sdgs.bappenas.go.id/dashboard/>

Perusahaan, Individu dapat mendaftarkan komitmen dan kontribusi mereka untuk “the Finland we want by 2050”. Layanan ini dikelola oleh *Commission for Sustainable Development* dan semua komitmen diterima, diterbitkan, dan diikuti oleh Komisi. Pada saat penulisan, ada 2852 komitmen yang telah dibuat²⁵.

Selain itu, **pemerintah perlu meningkatkan ketersediaan dan kualitas data terpilih untuk Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).** Keberadaan data GEDSI tidak hanya membantu memonitor bagaimana kelompok rentan terlibat namun juga apakah mereka mendapatkan manfaat dalam proses pembangunan. Data GEDSI mampu memberikan bukti nyata urgensi permasalahan yang dihadapi sehingga membantu memetakan kebutuhan dan respon untuk memastikan kelompok rentan tidak tertinggal dalam pembangunan.

Untuk mengajak seluruh pihak mendorong implementasi SDGs, maka kesadaran publik dan peningkatan kapasitas menjadi indikator penting untuk dinilai. **Sayangnya, kuesioner menunjukkan bahwa kesadaran publik merupakan indikator kedua dengan nilai terendah.** Hal ini sejalan dengan riset “Derajat Pemahaman Publik: Sebuah Pijakan bagi Kolaborasi SDGs di Indonesia” yang disusun INFID pada tahun 2021. Pengetahuan publik mengenai SDGs sudah ada, namun masih minim terutama dalam hal: bagaimana para pihak terlibat dalam mendorong implementasi SDGs. Hampir semua responden menilai SDGs sangat penting (95,9%). Sebagian besar responden (57,7%) menyatakan mengetahui RAN SDGs, namun sebagian responden (53,6%) juga mengaku tidak tahu cara terlibat atau berpartisipasi dalam penyusunan RAN SDGs tersebut.

Selain itu, riset INFID (2019) juga menemukan gap dalam memahami SDGs. Masyarakat secara umum belum banyak yang tahu tentang SDGs, seperti nelayan, pedagang pasar, sopir, dan komunitas perempuan. Informasi tentang SDGs masih menjadi pengetahuan terbatas di kalangan pemerintah daerah, CSO, akademisi, dan mahasiswa²⁶.

Salah satu responden riset dari Indonesia timur memperkuat *statement*

²⁵ <https://sitoumus2050.fi/en/web/sitoumus2050/home#/>

²⁶ INFID. (2019). *Studi Keterbukaan Pemerintah dalam Rangka Mendorong Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Daerah*. Jakarta: INFID

dibutuhkannya peningkatan kesadaran publik, “SDGs di Papua Barat merupakan istilah yang cukup asing, pada implementasinya masih membutuhkan perjuangan panjang”

Dalam konteks kemitraan multipihak, Perpres Nomor 59 Tahun 2017 menekankan pentingnya peran dan Kemitraan Multipihak dalam pelaksanaan TPB. Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas juga menerbitkan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 yang memuat peran masing-masing pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan pencapaian TPB.

Beberapa pencapaian untuk mendorong kemitraan SDGs diantaranya sebagai berikut:

1. Universitas di Indonesia telah memiliki 25 SDGs Center/Network/Hub (Per 10/2021) yang berfokus pada studi kebijakan yang berorientasi pada tujuan SDGs.
2. Adanya The Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSO), CEO dari perusahaan yang beroperasi di Indonesia, yang memiliki komitmen untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, keseimbangan ekologi dan sosial²⁷
3. SDGs Youth Hub, wadah untuk pemuda berinteraksi dan berkolaborasi dengan pemangku kebijakan, termasuk pemerintah, CSO, filantropis dalam membahas isu-isu pembangunan yang berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan²⁸
4. Koalisi CSO untuk SDGs, yaitu gabungan berbagai organisasi masyarakat sipil dengan berbagai latar belakang dan beberapa Universitas yang memiliki kesamaan untuk mengadvokasi pelaksanaan dan pencapaian SDGs di Indonesia²⁹

Dalam prosesnya, kemitraan multipihak untuk mendorong implementasi SDGs belum dilakukan secara substantif. Mayoritas kebijakan penting negara disusun tanpa melibatkan partisipasi yang bermakna dari lembaga

²⁷ <https://ibcsd.or.id>

²⁸ <https://sdgsyouthhub.id>

²⁹ <https://www.sdg2030indonesia.org>

non pemerintah termasuk CSO. Biasanya CSO dilibatkan dalam proses sosialisasi yang bersifat momentum. Seakan-akan ketika ada kritik yang viral di publik mengenai salah satu kebijakan, CSO baru dilibatkan dan diajak berdialog. Apabila dari awal perumusan kebijakannya partisipatif dan terbuka, tidak akan terjadi gugatan dari masyarakat sipil yang memperpanjang perumusan kebijakan.

“Kami contohnya tidak dilibatkan ketika merumuskan kebijakan rancangan undang-undang KUHP. Yang sering terjadi adalah pemerintah menyusun sendiri draftnya, kemudian RUU disembunyikan/tidak dipublish, ketika kami dapat bocoran ternyata ada pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers, baru diramaikan dengan mengundang dewan pers, draft dipublikasikan ke publik dan baru terbangun proses dialog”.

Keterlibatan CSO dalam kebijakan juga memiliki variasi yang berbeda.

Misalnya ada yang sudah dilibatkan namun terbatas, namun ada juga yang harus “menggedor” untuk dibukakan pintu berdialog. Selain itu, inisiatif SDGs seakan-akan dijalankan sendiri-sendiri dari tiap institusi baik pemerintah, bisnis dan CSO tanpa ada kolaborasi yang bermakna dalam implementasinya.

“Di tingkat provinsi hanya berhenti membuat rencana aksi daerah sampai Surat Edaran (SE) turun, habis itu tidak ada implementasi yang melibatkan masyarakat sipil”

“Untuk indikator 16.10.2 mengenai akses data kami dilibatkan dalam perencanaan dengan para stakeholder dalam skala nasional. Namun berhenti sampai di perencanaan, sementara implementasi dan monev belum ada kabarnya. Nanti kami dikumpulkan dan akan ramai lagi saat mau pelaporan VNR”

“Keterlibatan CSO dan kelompok rentan sangat artifisial dan seremonial, kami hanya diundang saat launching di provinsi. Banyak pejabat pemerintah di tingkat provinsi hingga kabupaten, apalagi desa, tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang RAN dan RAD SDGs. Koordinasi antar instansi/K/L sangat lemah, apalagi pengakuan terhadap kerja CSO, belum diposisikan sebagai mitra strategis dengan kontribusi yang berarti dalam penyusunan rencana kerja implementasi RAN dan RAD SDGs”

“Untuk isu akses data dan perlindungan pada jurnalis, hambatannya sebenarnya lebih besar soal akses untuk dialog, misalnya tadi disebutkan soal kompetensi katakanlah “kami merasa” memiliki kompetensi mau usul dan sebagainya tetapi pintunya itu tidak dibuka. Jadi lebih ke akses (kami itu mau ngobrol tapi tidak dibukakan pintu, harus digedor-gedor dulu baru dibukakan).”

Di satu sisi, partisipasi masyarakat sipil dalam mendorong SDGs juga perlu diperkuat. CSO harapannya dapat konsisten mendorong dan mengawal kebijakan-kebijakan yang mendorong pembangunan berkelanjutan.

“Partisipasi masyarakat sipil juga belum optimal dan lebih banyak mengimplementasikan program/project yang didapatkannya dari lembaga donor. Belum ada kerjasama yang sistematis antara pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha untuk mengimplementasikan program penanggulangan kemiskinan seperti TNP2K. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengurangi tingkat kemiskinan absolut yang angkanya masih tinggi. Hanya saja kebijakan-kebijakan tersebut belum terimplementasi dengan baik, khususnya di daerah”.

Berdasarkan kuesioner, 82% responden CSO menganggap terbatasnya informasi untuk terlibat menjadi hambatan untuk mendorong implementasi SDGs. Hambatan lainnya yaitu anggaran (76%), Advokasi kebijakan dengan pemerintah (70%), Pengumpulan data dan moneyv (55%) serta pengetahuan mengenai SDGs (30%)

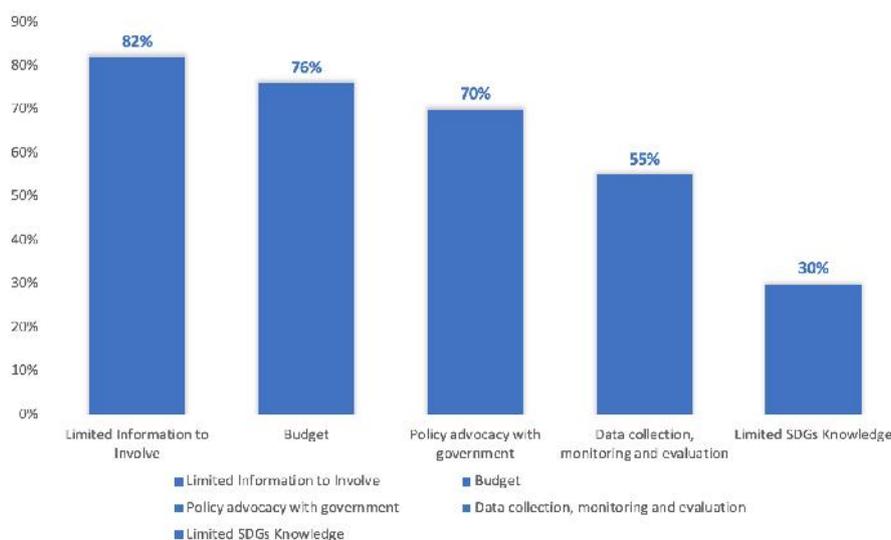


Figure 7. PSC SDGs implementation constraints

Walaupun ada berbagai tantangan selama hampir 7 tahun didorong, SDGs telah membantu menstruktur kerja CSO, serta menjadi sumber legitimasi dan peluang memperkuat kolaborasi multipihak untuk mendorong pembangunan berkelanjutan baik antar CSO maupun dengan Kementerian/Lembaga.

Kelompok masyarakat sipil, misalnya, ikut mendorong urgensi adopsi SDGs kepada pemerintah Indonesia bersamaan dengan deklarasi SDGs di New York tahun 2015. Pada momen tersebut, kelompok masyarakat sipil yang hadir pada Sidang Umum PBB (United Nation General Assembly atau UNGA) 2015, menyelenggarakan *side event* dan audiensi dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla sebagai perwakilan tertinggi RI di UNGA, dengan tujuan menyatakan komitmen bahwa CSO Indonesia mendukung pelaksanaan SDGs nasional dengan memastikan partisipasi semua pihak.

Aksi advokasi pada tingkat nasional dilanjutkan dengan mendorong adanya kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Perpres Nomor 59 Tahun 2017 merupakan hasil dari tuntutan kerangka regulasi. Pada kerja kelembagaan dan teknokratik, INFID secara rutin melakukan konferensi nasional SDGs tahunan sejak 2015 hingga 2018 di Jakarta. Konferensi ini mengundang perwakilan pemerintah pusat dan daerah, CSO, dan *women rights organizations* (WRO), universitas, swasta, dan filantropi. Selain itu, INFID juga menyusun dokumen panduan pelaksanaan SDGs dan mendampingi daerah kabupaten dan kota dalam menyusun dokumen dengan mempertimbangkan modalitas dan kondisi daerah yang berbeda-beda, yang diharapkan berkontribusi positif untuk pelaksanaan dan pencapaian SDGs³⁰.

Migrant CARE Jember juga turut aktif mendorong implementasi SDGs dengan mengintegrasikan SDGs dalam rencana pembangunan daerah

“Kami berkolaborasi dengan dua pemerintahan (dua orang bupati) untuk membantu menyusun RPJMD bupati terpilih dengan *mainstreaming* SDGs sesuai Perpres 59. Hal tersebut berarti SDGs sudah mulai dipertemukan dengan hal-hal yang teknokratik, sudah diadaptasi dan sudah mulai dijalankan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri 86

³⁰ INFID. (2019). *Studi Keterbukaan Pemerintah dalam Rangka Mendorong Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Daerah*. Jakarta: INFID.

tahun 2017³¹”

Berbagai inisiatif masyarakat sipil di Indonesia bahkan sebelum SDGs disahkan menggambarkan semangat untuk mendorong SDGs tidak sekedar hanya “business as usual”. Kelompok kerja multi pihak yang didorong oleh masyarakat sipil bahkan di rekognisi secara formal oleh pemerintah. Namun, beberapa tahun belakangan, pencapaian SDGs cenderung stagnan dan involutif. Harapannya inisiatif yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil tidak menurun namun bisa dirawat dan di scale up dengan rekognisi dan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah.

Praktik Baik³²

Engendering Participatory Mapping (EPM) oleh Perempuan AMAN

Sejak 2018, kami melakukan penggalan data SDGs dalam bentuk kuesioner melalui pemetaan partisipatif berbasis gender yang dilaksanakan oleh perempuan adat dan kelompok marjinal. Saat ini, sudah ada sekitar 20-an komunitas yang datanya masih sering diperbaharui. Data yang ada kemudian kami kembalikan ke kampung untuk membangun dialog dan advokasi kebijakan RPJMDes. Dari proses tersebut, kami tidak hanya mengejar sebuah data tapi bagaimana menggali kapasitas perempuan adat sebagai penggali dan penulis data sehingga dapat memiliki kepercayaan diri dan akhirnya bisa memilih data-data tersebut untuk dibawa di ruang-ruang diskusi untuk memperjuangkan hak suara dan kepentingannya.

Beberapa capaian dari data tersebut adalah

1. Pengurus Harian Komunitas (PHKom) Menteng dan Pengurus Harian Daerah (PHD) Deli di Wilayah Adat Rakyat Penunggu berhasil mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengakuan Kampung Adat Menteng Tualang Pusu dan Saentis dari Kepala Desa pada tahun 2020
2. PHD Mentawai telah merancang Peraturan Desa untuk Wilayah Kelola Perempuan Adat di komunitas Uma Usut Ngaik, Desa Matobe di Sumatera Barat

³¹ Hasil dari Diskusi Terfokus pada 11 Agustus 2022

³² Hasil dari Diskusi Terfokus pada 11 Agustus 2022

3. PHD Massenrempulu, Enrekang di Sulawesi Selatan menggunakan data sebagai basis tindak lanjut pengelolaan hutan adat paska diterbitkannya Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat
4. PHD Paser di Kalimantan Timur telah mendorong usulan hutan adat di 2 lokasi yaitu di kaki Gunung Bule dan Hutan Mangrove di Wilayah Rangan. Bahkan menjadi salah satu finalis Equator Prize pada tahun 2020.
5. Pada tingkat global Data *Engendering Participatory Mapping* (EPM) digunakan sebagai evidence base dalam penulisan Laporan Shadow CEDAW Report Indonesia mengenai Perempuan Adat yang menghasilkan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia untuk pengakuan dan pemenuhan Hak Perempuan Adat dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.

Figure 8. SDGs best practice: Engendering Participatory Mapping (EPM) by Perempuan AMAN

3.1.4 Prinsip Leave No One Behind dalam Implementasi SDGs

Untuk memastikan SDGs yang memenuhi prinsip “*leave no one behind*”, responden menilai **66% Anak-anak rentan dan tertinggal dalam pembangunan, diikuti perempuan dan anak perempuan (62%) dan penyandang disabilitas (58%)**

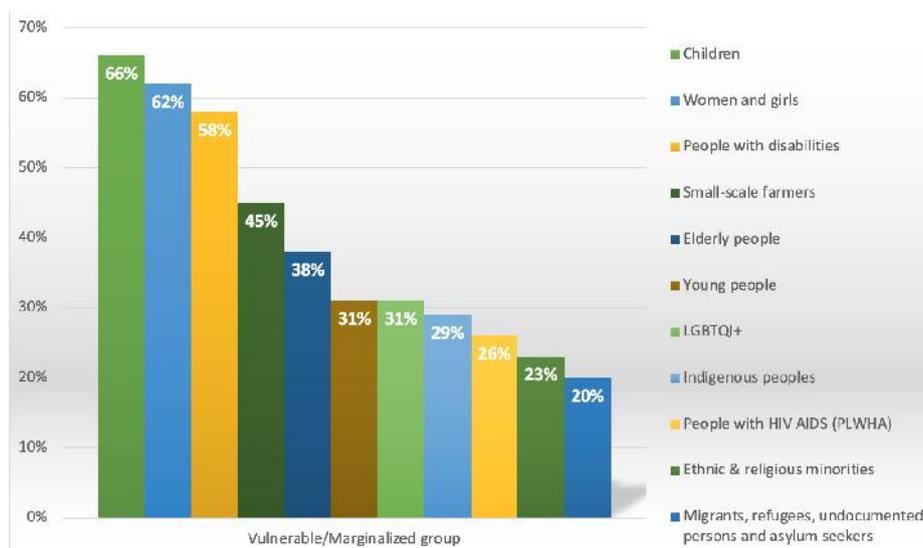


Figure 9. PSC Vulnerable groups are left behind in the implementation of Indonesia's SDGs

Sejalan dengan temuan tersebut, dalam mekanisme HAM internasional untuk Indonesia (Universal Periodic Review/UPR, Special Procedure dan Treaty Bodies), perempuan dan anak perempuan serta anak-anak juga mendapatkan rekomendasi terbanyak yaitu 273 dan 213 secara berurutan (The Danish Institute For Human Rights).

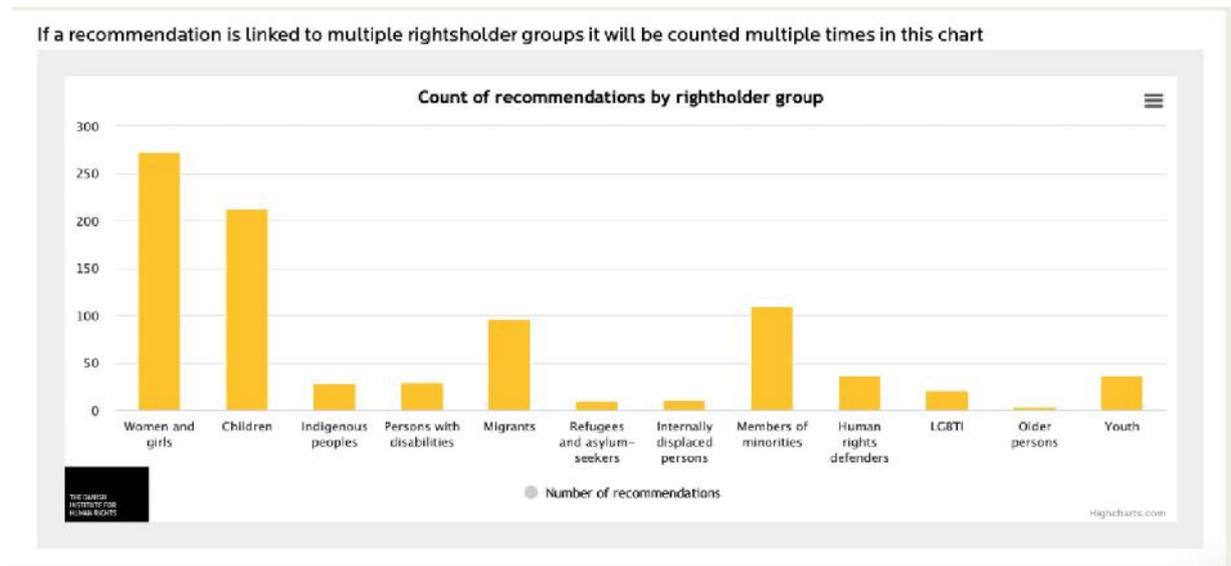


Figure 10. Recommendations of the International Human Rights Mechanism for Indonesia Linked to Multiple Rightsholder Groups

Beberapa rekomendasi untuk perempuan dan anak perempuan diantaranya sebagai berikut³³:

128 (g): Pelapor Khusus (The Special Rapporteur) merekomendasikan agar pihak berwenang Indonesia memastikan perlindungan komprehensif bagi perempuan dari segala bentuk kekerasan berbasis gender dengan mengatasi, tanpa penundaan, kesenjangan yang tersisa dalam undang-undang dan dalam praktik, untuk memastikan kesetaraan substantif dan pemenuhan hak perempuan kesehatan dan hak terkait (2018 A/HRC/38/36/Add.1 Special Procedures)

Meningkatkan dan memperluas Satuan Tugas Anti-Perdagangan Orang untuk mencakup setiap bagian negara dan mengubah undang-undangnya untuk memastikan bahwa perdagangan anak dalam segala bentuknya didefinisikan secara komprehensif dan

³³ The Danish Institute for Human Rights. (n.d.). Indonesia. Retrieved from SDG - Human Rights Data Explorer : <https://sdgdata.humanrights.dk/en/sdg/report/country/883>

dikriminalisasi (2017 [A/HRC/36/7](#) Universal Periodic Review)

Sementara dalam konteks disabilitas, ada berbagai CSO yang bergerak untuk memperjuangkan penyandang disabilitas di Indonesia, dan bahkan aktif menyusun “Laporan Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas untuk Voluntary National Review- Agenda 2030”.

Salah satunya adalah organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) yang telah melakukan berbagai kegiatan untuk mendorong pemberdayaan disabilitas. Beberapa diantaranya yaitu melatih 1000 penyandang disabilitas di Jawa Timur dalam pengembangan ekonomi JAPRI (Jadi Pengusaha Mandiri) dengan memberi 43 mesin jahit kepada perempuan disabilitas di DKI Jakarta selama masa pandemi untuk membangun kembali perekonomian akibat dampak COVID-19. Selain itu, HWDI juga membantu penyandang disabilitas dan tunarungu untuk membuat pembalut lebih dari 1000 kain untuk didistribusikan ke panti-panti untuk penyandang gangguan jiwa dan beberapa penyandang disabilitas.

Walaupun begitu, permasalahan isu disabilitas bukan berarti selesai. Masih banyak pekerjaan rumah untuk memastikan pelibatan dan meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Perwakilan HWDI dalam diskusi terfokus menyampaikan³⁴

“Terkait indikator disabilitas memang kita harus melakukan komparasi dengan The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), bahwa prinsipnya tidak boleh meninggalkan seorangpun. Dan dalam hal ini kita harus menjawab dua hal dari SDGs sesuai CRPD yaitu mengenai **keadilan prosedural** yang artinya sejauh mana seluruh pihak dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan **keadilan substansial** yaitu sejauh mana program pembangunan mampu menjawab persoalan-persoalan kelompok tertinggal dimana salah satunya adalah disabilitas.

Untuk itu, HWDI melakukan asesmen terkait pelaksanaan SDGs dalam kerangka standar pelayanan minimal yang berbasis CRPD di 14 area kerja. Asesmen menemukan

1. Belum adanya regulasi khusus terkait Standar Pelayanan Minimal

³⁴ Hasil dari Diskusi Terfokus pada 11 Agustus 2022

(SPM) dan aspek disabilitas di level daerah. Regulasi belum spesifik pada penyandang disabilitas, belum sesuai dengan UU nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas; dan belum tersosialisasi kepada semua orang/organisasi penyandang disabilitas dan SKPD.

2. Partisipasi masih terbatas dimana penyandang disabilitas hanya dilibatkan pada saat pelatihan dan keterampilan. Belum ada pelibatan organisasi disabilitas dalam perencanaan dan belum ada anggaran khusus pada bidang pelayanan dasar untuk disabilitas. Sistem informasi juga belum dapat diakses secara umum oleh penyandang disabilitas.
3. Pemahaman disabilitas hanya bersifat sektoral di dinas sosial. Belum adanya penguatan khusus bagi pemerintah daerah terkait dengan penyandang disabilitas, sementara di satu sisi, ada keterbatasan organisasi penyandang disabilitas dalam advokasi kebijakan.
4. Aksesibilitas fisik dibangun akan tetapi tidak memenuhi standar dan tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
5. Belum ada data valid terpilah dan terpilih tentang penyandang disabilitas”

3.2 Analisa Per Pilar

Apabila ditinjau per tujuan, tujuan yang mendapatkan nilai paling tinggi dalam 10 indikator adalah tujuan 4 (46) dan tujuan 5 (45). Sementara tujuan yang mendapatkan nilai paling rendah adalah tujuan 10 (31) dan tujuan 7 (34). Perlu diketahui bahwa untuk menghindari pengetahuan yang minim dalam mengisi kuesioner, peneliti berupaya agar responden mengisi sesuai dengan kapasitas dan kinerja lembaga.

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

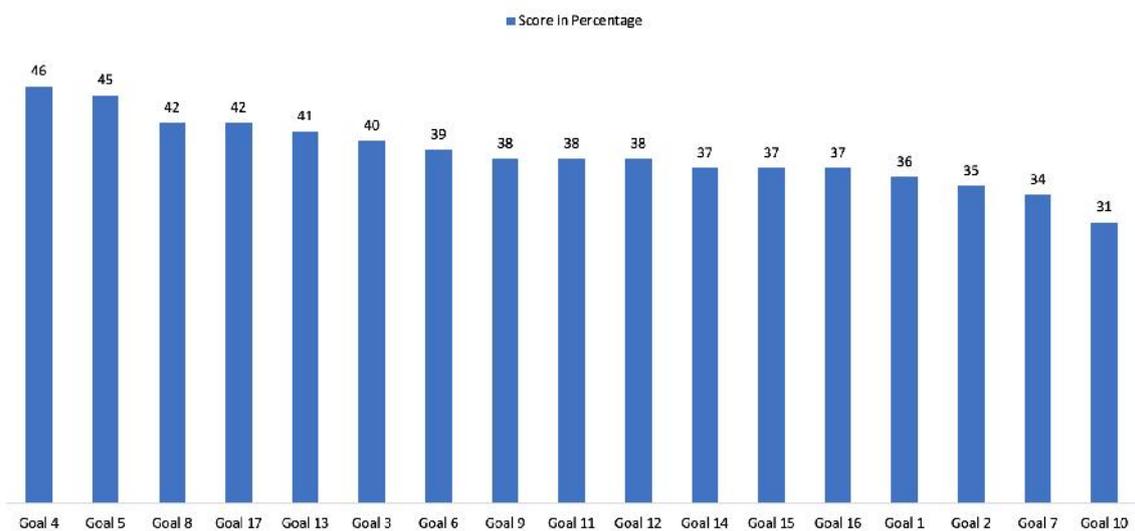


Figure 11. Indonesia PSC 2022: SDGs Score Per Goals

Untuk memudahkan analisa per tujuannya, peneliti akan membagi tujuan menjadi 4 pilar, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang telah disepakati sebagai berikut:

- Pilar pembangunan sosial: meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5
- Pilar pembangunan ekonomi: meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17
- Pilar pembangunan lingkungan: meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15

- Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: meliputi Tujuan 16

3.2.1 Pilar Pembangunan Sosial

Pilar Pembangunan Sosial (1, 2, 3, 4 dan 5) SDGs bertujuan untuk mendorong tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.



Figure 12. PSC SDGs score for social development pillar

Sejak 2019, beberapa capaian kebijakan untuk mendorong manusia berkualitas diantaranya sebagai berikut³⁵

No	Jenis	Nomor	Tahun	Tentang
1	UU	12	2022	TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
2	INPRES	1	2022	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
3	PERPRES	101	2022	STRATEGI NASIONAL PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
4	INPRES	5	2022	PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR MELALUI PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
5	INPRES	4	2022	PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

³⁵ <https://jdih.setneg.go.id/Terbaru>

6	PERPRES	88	2021	STRATEGI NASIONAL KELANJUTUSIAAN
7	PERPRES	75	2021	DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA
8	PERPRES	72	2021	PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
9	PERPRES	67	2021	PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
10	PERPRES	66	2021	BADAN PANGAN NASIONAL
11	UU	2	2020	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI UNDANG-UNDANG
12	UU	16	2019	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
13	PERPRES	75	2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

Figure 13. Policies to promote the quality of human resources

Secara keseluruhan, kemajuan upaya pencapaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial (1, 2, 3, 4 dan 5) yaitu 40 pada level “Kemajuan rendah”. Walaupun begitu, nilai pilar pembangunan sosial paling tinggi dibandingkan 3 pilar SDGs lainnya. Implementasi di tingkat nasional mendapatkan nilai tertinggi (46), sedangkan kesadaran publik mendapatkan nilai terendah yaitu 33.

Sebagai suatu agenda pembangunan yang transformatif, SDGs perlu diterjemahkan untuk mengawal kebijakan yang sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia/ *Human Development Index* (HDI) 2019, Indonesia berada pada posisi 107 dari 189

negara dengan nilai 0.718 (*High Human Development Category*). Nilai ini membaik namun Indonesia masih jauh dibandingkan negara tetangga dengan menduduki peringkat 6 ASEAN, tertinggal dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Dengan meningkatnya status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara hampir maju, Indonesia memang mengalami penurunan angka kemiskinan namun lambat. Hal ini kemudian diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat angka kemiskinan kembali menjadi *double digit*, tidak terkecuali kemiskinan ekstrem.

Untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah RI pada tahun 2024 melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerjasama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem³⁶. Inpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 8 Juni dikoordinasikan oleh Wakil Presiden selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo menginginkan kemiskinan ekstrem untuk mencapai 0 % pada 2024.

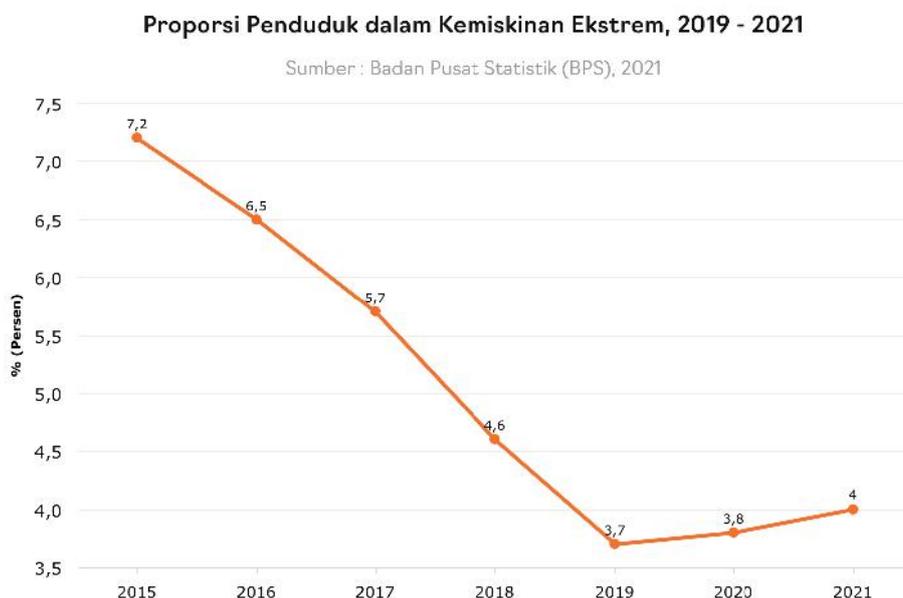


Figure 14. Proportion of population in extreme poverty 2019-2021

³⁶ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022, June 14). *Presiden Jokowi Keluarkan Inpres 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*. Retrieved from <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-keluarkan-inpres-4-2022-tentang-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem/>

Target yang ambisius tersebut kemudian menghasilkan pertanyaan mengenai visibilitasnya. Berdasarkan hasil simulasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Pembangunan Nasional, rata-rata angka kemiskinan ekstrem pada 2024 berkisar antara 2,6 dan 3,1 persen atau setara 7,2 - 8,6 juta jiwa.³⁷ Sehingga perlu ada kolaborasi dan kerja *extraordinary* (luar biasa) untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024.

Selain kemiskinan ekstrem, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi *stunting* berada di angka 24,4 persen. Walaupun menurun 6,4% dari angka 30,8% pada 2018, prevalensi *stunting* di Indonesia mengkhawatirkan karena masih di atas angka standar yang ditoleransi WHO, yaitu di bawah 20 persen.³⁸ Padahal Pemerintah mempunyai target untuk menurunkan *stunting* hingga 14% pada tahun 2024. Berdasarkan the 2021 Global Nutrition Report, Indonesia di urutan 108 dari 132 negara dalam *stunting*. Tujuh provinsi yang melaporkan kasus *stunting* tertinggi, di antaranya: Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Aceh³⁹

Persoalan *stunting* tidak bisa dipandang sepele. Anak dengan kondisi *stunting* cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Tidak hanya itu, pada usia produktif, individu yang pada usia balita dalam kondisi *stunting* berpenghasilan 20 persen lebih rendah. Kerugian negara akibat *stunting* diperkirakan mencapai sekitar Rp300 triliun per tahun. *Stunting* pun dapat menurunkan produk domestik bruto negara sebesar 3 persen⁴⁰.

Selain itu, berdasarkan Laporan World Bank tahun 2017, dalam sehari ada empat ibu di Indonesia yang meninggal akibat melahirkan (305 per 100 ribu). Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan Angka

³⁷ Iswara, M. A. (2022, January 27). *Kemiskinan Ekstrem 0% di Indonesia, Realita Atau Utopia Belaka? Baca selengkapnya di artikel "Kemiskinan Ekstrem 0% di Indonesia, Realita Atau Utopia Belaka?"*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/goej>

³⁸ Sekretariat Wakil Presiden. (2022, May 11). *Tahun 2022 Angka Prevalensi Stunting Harus Turun Setidaknya 3%*. Retrieved from <https://stunting.go.id/tahun-2022-angka-prevalensi-stunting-harus-turun-setidaknya-3/>

³⁹ Ibid

⁴⁰ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan. (2022, June 28). *Indonesia Peringkat 5 di Dunia, Stunting Disebut Bukan Hanya Urusan Pemerintah*. Retrieved from <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/828>

Kematian Ibu (AKI) tertinggi kedua di Asia Tenggara. Urutan pertama di tempati oleh Laos dengan angka kematian 357 per 100 ribu.⁴¹

Untuk itu, Pemerintah baru saja menerbitkan Inpres dimana ibu hamil yang tergolong fakir miskin, tidak mampu, dan yang tidak memiliki jaminan kesehatan akan ditanggung negara alias mendapat jaminan persalinan. Peraturan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Melahirkan Melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal). Inpres tentang program Jaminan Persalinan (Jampersal) tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 12 Juli 2022 dan berlaku sampai 31 Desember 2022. Pendanaan program Jampersal ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah sesuai undang-undang.

CSO yang bergerak dalam isu kesehatan menyampaikan

“Secara nasional program tentang kesehatan sudah sangat bagus, tetapi pendistribusian knowledge dari tingkat sub (daerah) dan ke desa (masyarakat) masih sangat minim sekali, bahkan desa sebagai subjek pembangunan masih belum bisa mengartikan atau membahasakan program pemerintah pusat karena keterbatasan SDM. CSO juga masih dipandang sebelah mata oleh OPD, seakan-akan kalau CSO mau ikut membantu dianggap sebagai pengganggu aktivitas mereka.”

Desa Berjuang Melawan Stunting

Perjuangan dalam menghadapi stunting menjadi perhatian dan prioritas banyak desa dan kelurahan di Indonesia, salah satunya adalah di kelurahan Banjararum, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekitar tahun 2017, Kelurahan memberikan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang berwujud uang untuk balita-balita yang mengalami gizi kurang.

Namun setelah dievaluasi, ternyata PMT dalam bentuk uang tunai ini

⁴¹Kumparan Sains. (2018, March 28). *Angka Kematian Ibu dan Bayi Indonesia Tertinggi Kedua di Asia Tenggara*. Retrieved from <https://kumparan.com/kumparansains/angka-kematian-ibu-dan-bayi-indonesia-tertinggi-kedua-di-asia-tenggara>

tidak menunjukkan kenaikan berat badan balita yang mengalami gizi kurang secara signifikan. Setelah ditelusuri, yang terjadi di lapangan ternyata uang yang seharusnya dibelanjakan untuk penanganan balita gizi kurang tidak digunakan sesuai tujuan, karena dibelanjakan oleh orang tuanya untuk kebutuhan lainnya.

Pada tahun berikutnya (2018), Kelurahan Banjararum kembali menganggarkan PMT, namun kali ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. PMT diberikan dalam bentuk bahan pangan mentah berupa telur, kacang hijau, beras merah dan lain sebagainya. Kelurahan kembali melakukan evaluasi. Ternyata, program ini masih juga belum tepat sasaran. Bahan mentah yang diberikan tidak hanya dikonsumsi oleh balita yang mengalami gizi kurang, tetapi juga dikonsumsi oleh anggota keluarga lainnya. Hal itu terjadi karena di rumah “ya mbah e, kakak e do maem” (ya kakek maupun kakaknya ikut makan). Padahal mereka tidak termasuk sasaran PMT.

“Saya, tim Kalyanamitra (CSO) dan ibu-ibu kader penggerak terus mencari inovasi-inovasi lainnya yang berharap bisa tepat sasaran. Dari Puskesmas juga memberikan indeks makan tambahan bagi balita gizi buruk. Disitu saya menemukan model untuk menganggarkan makanan tambahan dari balita yaitu dengan kegiatan pos gizi, dimana anak-anak yang mengalami gizi kurang dikumpulkan dalam satu tempat untuk diajak makan bersama” (Lurah Banjararum).

Dari dua pengalaman tersebut, muncul gagasan untuk membentuk Pos Gizi, dimana ibu dan balita kurang gizi dikumpulkan dan diberikan PMT secara bersama-sama. Pada awal program, Kelurahan Banjararum memiliki 5 pos gizi. Setelah 10 hari PMT dan 10 hari berhenti, hasil evaluasi menunjukkan kenaikan yang cukup bagus. Ketika ditambah lagi 10 hari, kenaikannya semakin bagus. Dari sini kemudian program Pos Gizi ini terus dilanjutkan sebagai upaya melawan stunting.

Dalam perjalanannya, pemerintah di Kelurahan dan para kader penggerakpun menyadari bahwa ternyata penanganan stunting tidaklah cukup dengan pemberian makanan bergizi saja. Penanganan stunting haruslah dimulai dari ketika bayi masih berada dalam kandungan Ibu. Berangkat dari kesadaran tersebut, muncul program berikutnya yaitu

kegiatan kelas bumil (ibu hamil), Kelas Bapak Siaga, dan Kelas Calon Pengantin. Atas berbagai upaya tersebut Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0% dan Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%

Referensi:Praktik BaikSDGsDesa:Studi Kesetaraan Gender,Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di 10 Desa (2022) yang disusun oleh INFID dan Kalyanamitra

Figure 15. SDGs best practice: Villages struggle against stunting (SDGs village best practices)

Untuk sektor pendidikan, Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam angka partisipasi pendidikan. Sektor pendidikan adalah salah satu belanja pemerintah paling besar yaitu minimal 20% dari APBN.

Sementara dalam isu kesetaraan gender, Indonesia baru saja mengesahkan Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hasil kerjasama berbagai pihak selama 10 tahun pada sidang paripurna DPR RI ke-19 pada April 2022. Selain itu, pada tahun 2019, Indonesia juga merevisi Undang-undang Perkawinan Tahun 2019 yang mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Pencapaian luar biasa ini atas kerjasama multipihak dan kemajuan untuk menangani masalah tingginya kasus perkawinan anak di Indonesia yang menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia⁴² Walaupun begitu, berdasarkan Badan Pusat Statistik melalui survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2020, data perkawinan usia dini memang menurun tapi tidak cukup signifikan. Salah satunya karena Undang-undang memberikan lubang (loophole) untuk pengesahan perkawinan usia dini apabila ada dispensasi dari Pengadilan Agama serta masih adanya nilai sosial budaya yang permisif

Belum berhenti, perjuangan untuk menangani kesetaraan gender di dalam negeri masih panjang. Berdasarkan SDGs Gender Index 2022, Indonesia berada di posisi 76 dari 144 negara dengan nilai 66,7 poin dan

⁴²Ellyvon, P. (2021, May 20). *Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>

dikategorisasikan sebagai *Poor*⁴³. Global Gender Gap 2021 juga menyampaikan bahwa Indonesia merupakan satu dari dua negara di Asia Timur dan Pasifik yang mengalami penurunan nilai 1,3% dari tahun 2020. Hal ini membuat ranking Indonesia turun 16 posisi menjadi 101/156 negara. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kesenjangan peluang dan partisipasi ekonomi yang berkurang 4% dibandingkan tahun 2020. Terjadi penurunan tajam porsi perempuan sebagai senior di tempat kerja, terbatasnya partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja (55,9% perempuan dan 84% laki-laki) dan kesenjangan upah dan pendapatan. Selain itu, 81,8% pekerjaan perempuan berada di sektor informal (dibandingkan dengan 79,4% laki-laki).

Kesenjangan Pemberdayaan Politik juga masih lebar. Perempuan di posisi menteri turun dari 23,5% pada Januari 2019 menjadi 17,1% pada Januari 2021. Kebijakan afirmasi atau kuota 30 persen untuk perempuan di parlemen sejak tahun 2008 juga tidak pernah terpenuhi⁴⁴. Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan⁴⁵.

Beberapa pendapat mengenai program kesetaraan gender dari CSO diantaranya:

“Kesetaraan gender dalam hal ini adalah layanan terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Berdasarkan catatan, pengaduan kasus setiap tahun meningkat. Sayangnya belum banyak penguatan khusus (baik dana dan sumber daya lainnya) bagi lembaga penyedia layanan dalam melayani perempuan korban kekerasan”

“Program pengarusutamaan gender hanya superficial dalam konteks teknis, perlu banyak program dan intervensi di wilayah untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat serta lembaga

⁴³ Equal Measures 2030 (2022). 'Back to Normal' is Not Enough: the 2022 SDG Gender Index. Retrieved from <https://www.equalmeasures2030.org/2022-sdg-gender-index/>

⁴⁴ Mazrieva, E. (2022, February 22). *Mengapa Perempuan Tak Kunjung Capai Kuota 30% di DPR?* Retrieved from VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-perempuan-tak-kunjung-capai-kuota-30-di-dpr-/6452476.html>

⁴⁵ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2021, April 15). *Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia Penting bagi Kemajuan Bangsa*. Retrieved from <https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa>

pemerintah dalam menginternalisasi keadilan gender”

3.2.2 Pilar Pembangunan Ekonomi

Pilar pembangunan ekonomi SDGs bertujuan untuk mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan.



Figure 16. PSC SDGs score for economic development pillar

Sejak 2019, beberapa capaian kebijakan untuk mendorong ekonomi berkualitas diantaranya sebagai berikut⁴⁶

No	Jenis	Nomor	Tahun	Tentang
1	UU	11	2020	CIPTA KERJA
2	PERPRES	63	2020	PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2020-2024
3	PERPRES	44	2020	SISTEM SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA
4	INPRES	2	2022	PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

⁴⁶ <https://jdih.setneg.go.id/Terbaru>

				DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI DALAM RANGKA MENYUKSESKAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH
--	--	--	--	---

Figure 17. Policies to promote the quality of economy

Secara keseluruhan, kemajuan upaya pencapaian SDGs Pilar pembangunan ekonomi (7, 8, 9, 10 dan 17) yaitu 38 pada level “Kemajuan rendah”. Rencana aksi mendapatkan nilai tertinggi (46), sementara monitoring dan evaluasi mendapatkan nilai terendah yaitu 31.

Berdasarkan artikel *What are we trying to measure?* by Dudley Seers (1972)⁴⁷, pertanyaan yang perlu diajukan tentang pembangunan suatu negara adalah: apa yang telah terjadi pada kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan? Jika ketiganya telah berkurang, maka tidak diragukan lagi bahwa pembangunan telah terjadi di negara yang bersangkutan. Jika satu atau dua dari masalah-masalah sentral ini menjadi lebih buruk, apalagi jika ketiganya, maka akan menjadi aneh untuk menyebut hasilnya sebagai “pembangunan”.

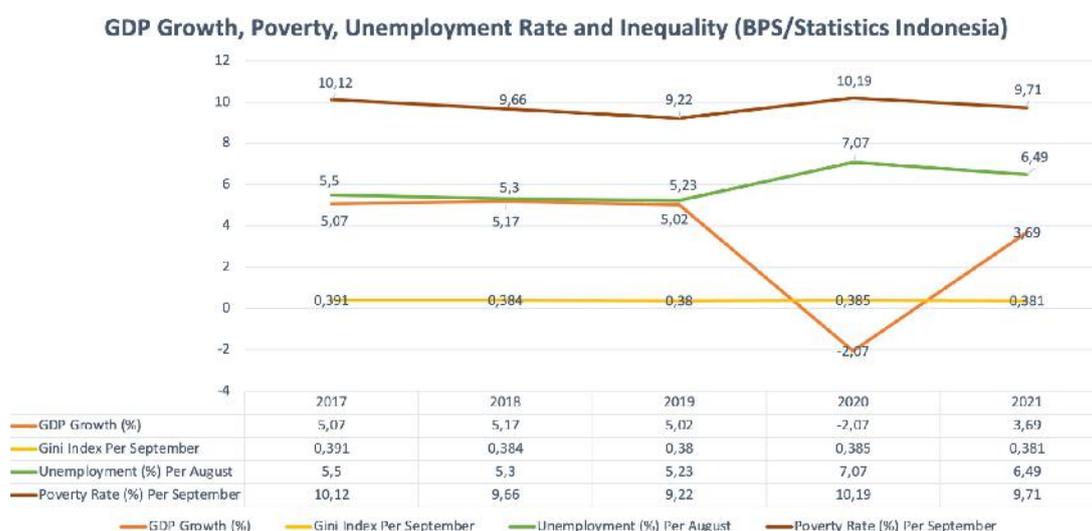


Figure 18. GDP growth, poverty, unemployment rate and inequality (BPS/Statistics Indonesi)

⁴⁷ Seers, D. (1972). What are we trying to Measure? *The Journal of Development Studies*, 8(3), 21-36. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220387208421410?journalCode=fjds20>

Berdasarkan gambar diatas, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, angka pengangguran dan indeks gini Indonesia sudah mulai membaik seiring dengan meningkatnya mobilitas dan konsumsi masyarakat karena kasus COVID-19 yang melandai. Walaupun fundamental Indonesia lebih kuat dalam menghadapi krisis, namun jantung ekonomi Indonesia tidak berjalan dengan baik. Menteri Pembangunan Nasional Perencanaan, Bambang Brodjonegoro, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan karena proses industrialisasi yang lemah⁴⁸. Pada 2015, industri manufaktur mencatatkan kontribusi sebesar 20,99 persen terhadap PDB, sebelum mengalami penurunan 4 tahun berturut-turut hingga 2019 yakni 20,52 persen, 20,16 persen, 19,86 persen, dan 19,62 persen. Pada tahun 2020, angka kontribusi tersebut sedikit naik menjadi 19,88 persen.

Dengan karakteristik industri manufaktur yang cenderung padat karya, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Muhammad Faisal, menilai sektor manufaktur memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja produktif yang semakin meningkat⁴⁹. Industri manufaktur juga memberikan kontribusi pajak yang tinggi kepada negara⁵⁰ dan menciptakan efek multiplier dalam menggerakkan perekonomian yaitu bisnis perumahan, katering, laundry, dan transportasi.

Dengan melemahnya sektor manufaktur, kesempatan kerja bagi orang-orang produktif termasuk kaum muda juga menurun. Sehingga, tidak heran angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia menurun dengan lambat, ekonomi juga tidak tumbuh seperti yang diharapkan. Di tengah situasi demografi bonus, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada penduduk usia 20-24 tahun sebesar 17,66% pada Februari 2021, hampir 3 kali lipat lebih besar dibandingkan persentase pengangguran Indonesia yaitu 6,26 %

Selain dari perspektif penawaran/*supply*, perlu intervensi dalam peningkatan

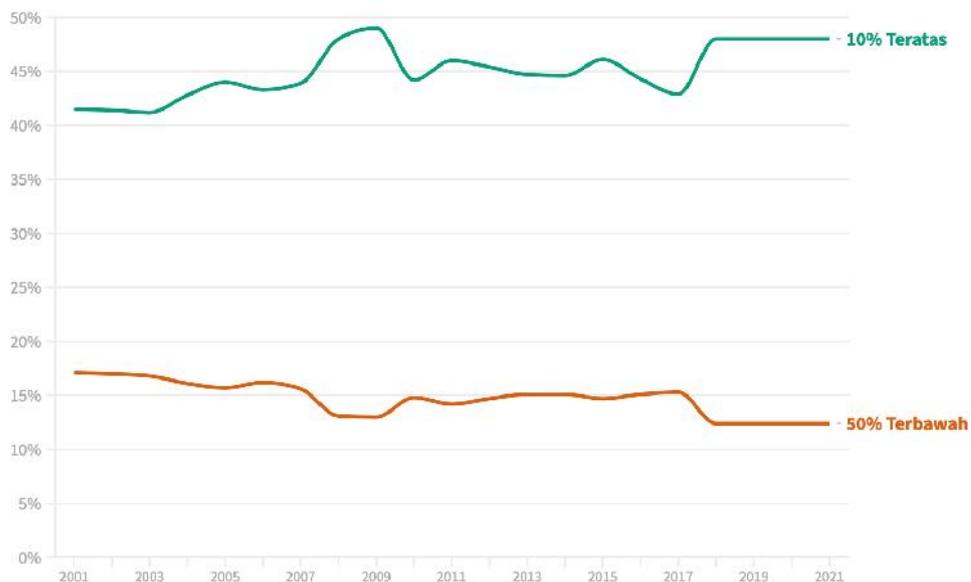
⁴⁸ <https://www.feb.ui.ac.id/blog/2019/07/03/bambang-ps-brodjonegoro-keharusan-transformasi-industri/>

⁴⁹ Winarto, Y. (2018, December 3). Sektor manufaktur berpotensi besar serap bonus demografi. Retrieved from Kontan.co.id:<https://nasional.kontan.co.id/news/sektor-manufaktur-berpotensi-besar-serap-bonus-demografi>

⁵⁰ Deny, S. (2017, October 30). Industri Manufaktur Bisa Jadi Andalan Tingkatkan Penerimaan Pajak. Retrieved from Liputan6.com:<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3145304/industri-manufaktur-bisa-jadi-andalan-tingkatkan-penerimaan-pajak>

kualitas angkatan kerja, khususnya yang berumur muda agar sesuai dengan permintaan pasar dan mendapatkan pekerjaan yang layak (Goal 8). Salah satu yang telah dilakukan oleh CSO Swara Nusa di Yogyakarta adalah kolaborasi Skill Development Center (SDC) yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kulon Progo, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan akademis (Pendidikan/Pelatihan). Tugas utama SDC adalah memadukan dan mensinergikan program dan layanan pendidikan dan pelatihan vokasi serta sertifikasi dan rekognisi kompetensi sesuai dengan kebutuhan DuDi di daerah.

Indikator ketimpangan indeks gini Indonesia juga terindikasi menurun namun sangat lambat. Bahkan, menurut data *World Inequality Report* (WIR) 2022, ketimpangan pendapatan di Indonesia semakin melebar. Secara historis, ketimpangan pendapatan di tanah air telah ada sejak tahun 1900 dan meningkat tajam pada tahun 1980-an setelah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan. Setelah tahun 1999 hingga sekarang, ketimpangan di Indonesia belum menunjukkan perbaikan



Sumber: World Inequality Lab

Figure 19. Income distribution of the top 10% and bottom 50% in Indonesia (2001-2021)

Kondisi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, kemudian diperparah dengan *tax ratio* Indonesia yang rendah. **Rasio pajak Indonesia terus**

Kondisi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, kemudian diperparah dengan *tax ratio* Indonesia yang rendah. **Rasio pajak Indonesia terus menurun dari 11,4 % di 2018, 10.73 persen pada 2019, 8.33 persen pada tahun 2020.** Di tahun 2021, rasio pajak Indonesia naik sedikit sebesar 9,11 persen, walaupun persentase ini menjadi paling rendah di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Sebagai perbandingan, pada tahun 2018, Thailand mampu mencapai 17,5% PDB, Singapura 13,2% PDB, Malaysia 12,5% PDB, dan Papua Nugini 12,1% PDB⁵¹

Hal ini tentu berdampak terhadap pencapaian SDGs Indonesia. Indonesia perlu segera menaikkan rasio pajaknya agar dapat membiayai kebutuhan belanja negara, khususnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Apabila tidak memadai, kebutuhan tersebut akhirnya harus diserahkan pada swasta dan sebagian dipenuhi dari utang, yang tentunya akan sangat berdampak terhadap pencapaian SDGs dan membebani generasi selanjutnya.

3.2.3 Pilar Pembangunan Lingkungan

Pembangunan Lingkungan SDGs adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan

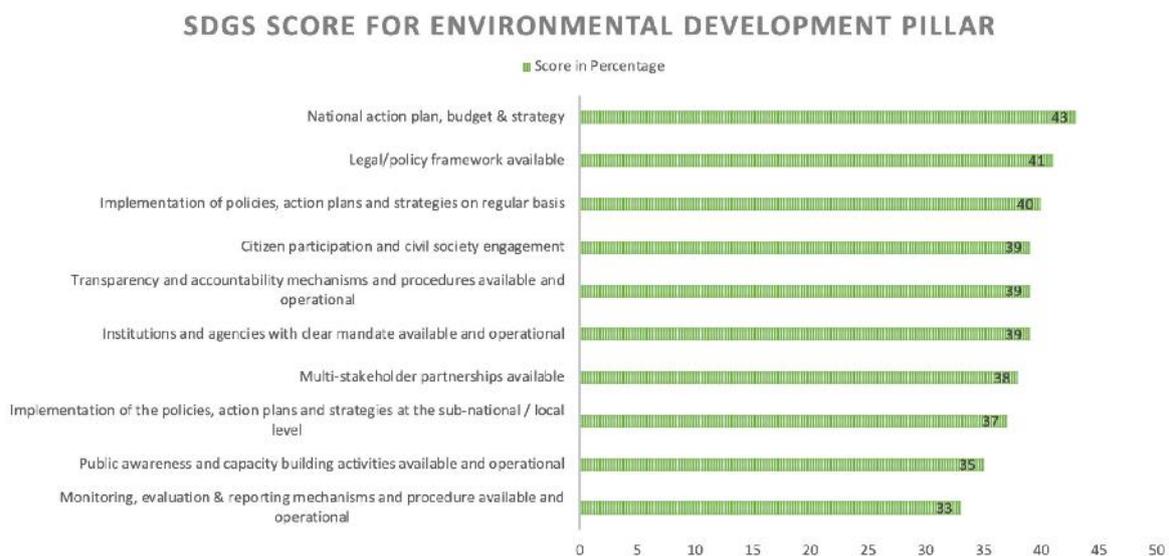


Figure 20. PSC SDGs score for environmental development pillar

⁵¹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220720102045-532-823731/sri-mulyani-sebut-rasio-pajak-indonesia-terendah-se-asean-dan-g20>

Sejak 2019, beberapa capaian kebijakan untuk mendorong pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan diantaranya sebagai berikut⁵²

No	Jenis	Nomor	Tahun	Tentang
1	PERPRES	53	2022	DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
2	PERPRES	34	2022	RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA TAHUN 2021-2025
3	UU	3	2020	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
4	UU	22	2019	SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN
5	UU	17	2019	SUMBER DAYA AIR
6	INPRES	5	2019	PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT

Figure 21. Policies to promote sustainable natural resource and environmental

Secarakeseluruhan, kemajuan upayapencapaianSDGsPilarPembangunan Lingkungan (6, 11, 12, 13, 14 dan 15) yaitu 38 pada level “Kemajuan rendah”.

Sejalan dengan pilar ekonomi, Rencana aksi mendapatkan nilai tertinggi (43), sementara monitoring dan evaluasi mendapatkan nilai terendah yaitu 33.

Climate Action Tracker (CAT) menilai target dan kebijakan iklim Indonesia “sangat tidak mencukupi”. Peringkat “sangat tidak mencukupi” menunjukkan bahwa kebijakan dan komitmen iklim Indonesia mengarah pada peningkatan, bukannya penurunan emisi dan sama sekali tidak konsisten dengan batas suhu 1,5°C Perjanjian Paris. Padahal, Indonesia sebagai salah satu pihak yang menandatangani Perjanjian Paris telah meratifikasinya dalam hukum nasional melalui UU Nomor 16 Tahun 2016.

Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen untuk merespon

⁵² <https://jdih.setneg.go.id/Terbaru>

perubahan iklim namun kebijakan pemerintah tidak mendukung klaim tersebut. Misalnya, kapasitas batu bara Indonesia terus meningkat hingga tahun 2027 dan direncanakan untuk mengisi 64% pembangkit listrik pada tahun 2030, padahal seharusnya maksimal 10% pada tahun 2030⁶³.

Berdasarkan indeks transisi energi dari World Economic Forum, Indonesia menduduki peringkat 71 dari 115 negara atau urutan ke-6 di Asia Tenggara dengan nilai 56. ETI terbentuk atas tiga elemen performa sistem, yakni keamanan dan akses terhadap pasokan energi, keberlanjutan lingkungan, serta pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Selain itu, sejumlah kesiapan transisi juga menjadi indikator, seperti modal dan investasi, struktur sistem energi, serta komitmen dan regulasi⁶⁴.

Kebijakan pemberlakuan Omnibus Law tentang penciptaan lapangan kerja atau revisi undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) juga menggambarkan kurangnya komitmen politik dan akuntabilitas untuk mendorong transisi pembangunan yang lebih berkelanjutan⁶⁵.

Kelompok masyarakat sipil saat ini sedang mengajukan *Judicial Review* (JR) UU Minerba ke Mahkamah Konstitusi. Tim Advokasi UU Minerba menyampaikan beberapa pasal yang digugat antara lain:

1. Pasal 4 ayat 2, menyatakan penguasaan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, proses penolakan warga menjadi sulit karena kewenangan ada di Jakarta.
2. Pasal 17 a ayat 2 dan Pasal 22 a menyatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin tak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan. Aturan ini praktis menyebabkan wilayah itu terjamin terus menerus sebagai wilayah pertambangan meski daya dukung daya tampung lingkungan terlampaui.
3. Pasal 162, menyebutkan, setiap orang yang merintangi atau mengganggu usaha pertambangan bisa dipidana paling lama

⁶³ Climate Action Tracker. (2021, November 1). *Country Summary Indonesia*. Retrieved from <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/>

⁶⁴ World Economy Forum (2021, April 20) *Fostering Effective Energy Transition 2021* edition. Retrieved from <https://www.weforum.org/reports/fostering-effective-energy-transition-2021/>

⁶⁵ Climate Action Tracker. (2021, November 1). *Country Summary Indonesia*. Retrieved from <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/>

satu tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.⁵⁶ Pasal ini bisa mengkriminalisasi masyarakat yang tidak setuju mengenai pertambangan

3.2.4 Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola SDGs mendorong agar terwujud kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. SDGs 16+ tidak berdiri sendiri melainkan *enabler* untuk percepatan Implementasi SDGs.



Figure 22. PSC SDGs score for law and governance development

Sejak 2019, beberapa capaian kebijakan untuk mendorong kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif diantaranya sebagai berikut⁵⁷

No	Jenis	Nomor	Tahun	Tentang
1	UU	19	2019	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

⁵⁶ Syahni, D. (2021, October 7). Gugat UU Minerba, Upaya Kurangi Beban Lingkungan dan Masyarakat. Retrieved from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2021/10/07/gugat-uu-minerba-upaya-kurangi-beban-lingkungan-dan-masyarakat>

⁵⁷ <https://jdih.setneg.go.id/Terbaru>

2	PERPRES	53	2021	RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021-2025
3	PERPRES	39	2019	SATU DATA INDONESIA

Figure 23. Policies to promote legal certainty and governance processes

Secara keseluruhan, kemajuan upaya pencapaian SDGs Pilar Hukum dan Tata Kelola SDGs (16) yaitu 37 pada level “Kemajuan rendah”. Rencana aksi mendapatkan nilai tertinggi (46), sementara monitoring dan evaluasi mendapatkan nilai terendah yaitu 30.

Dalam mekanisme HAM internasional untuk Indonesia (Universal Periodic Review/UPR, Special Procedure dan Treaty bodies), SDGs 16 merupakan tujuan dengan rekomendasi terbanyak dengan total 316 rekomendasi.

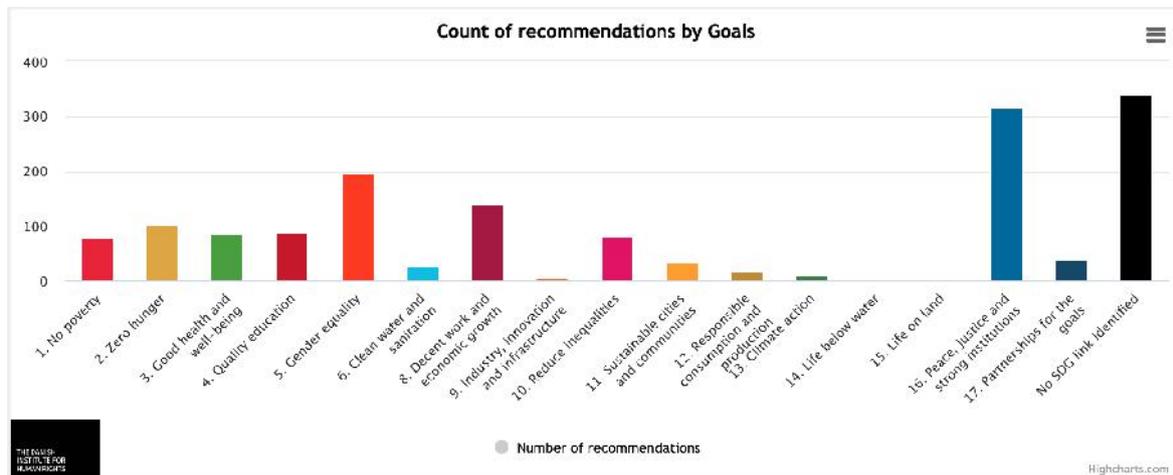


Figure 24. Recommendations of the International Human Rights Mechanism for Indonesia Linked to SDGs

Beberapa rekomendasi untuk tujuan 16 diantaranya sebagai berikut⁵⁸:

Menjamin penghormatan hak atas pengadilan yang adil, sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk hak untuk mengajukan banding bagi orang-orang yang dijatuhi hukuman mati (2017 A/HRC/36/7 Universal Periodic Review)

Mengambil tindakan tegas untuk mencegah dan secara efektif menuntut tindakan kekerasan dan hasutan kebencian terhadap minoritas agama

⁵⁸ The Danish Institute for Human Rights. (n.d.). *Indonesia*. Retrieved from SDG - Human Rights Data Explorer : <https://sdgdata.humanrights.dk/en/sdg/report/country/883>

dan melawan diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama (2017 A/HRC/36/7 Universal Periodic Review)

Sebagai negara yang sedang dalam proses demokratisasi, pada akhir tahun 2020 Indonesia masuk dalam kategori “weak democracy” setelah pada tahun 2000 sampai 2020 berada dalam kategori “mid range democracy”⁵⁹.

Salah satu indikator yang berkontribusi terhadap penurunan ini adalah korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang disusun oleh *Transparency International* menyatakan nilai IPK Indonesia turun 3 poin pada tahun 2020 setelah sempat menyentuh angka tertingginya sebesar 40 pada tahun 2019. Pada tahun 2021, IPK Indonesia mulai kembali merangkak naik 1 poin menjadi 38 dan menempatkan Indonesia dalam posisi 96 dari 180 negara⁶⁰.

Selain korupsi, undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan untuk mengkriminalisasi perbedaan pendapat secara online. Sejumlah aktivis yang memprotes pembaruan sepihak UU Otonomi Khusus Papua pada Juli dan Agustus 2021 juga ditahan dan diperlakukan dengan kekuatan berlebihan.

Salah satu responden menyampaikan mengenai kerja untuk mendorong perlindungan jurnalis di Indonesia

“Pada goal 16.1 kolaborasi soal perlindungan para jurnalis ini masih baru di Indonesia. Untuk isu perlindungan jurnalis dan penggiat HAM, kami bermitra dengan kepolisian yang artinya kepolisian adalah institusi yang melindungi jurnalis ketika ada kasus-kasus tertentu. Namun, di satu sisi, berdasarkan data kami, institusi kepolisian justru yang cukup tinggi melakukan kekerasan pada jurnalis.”

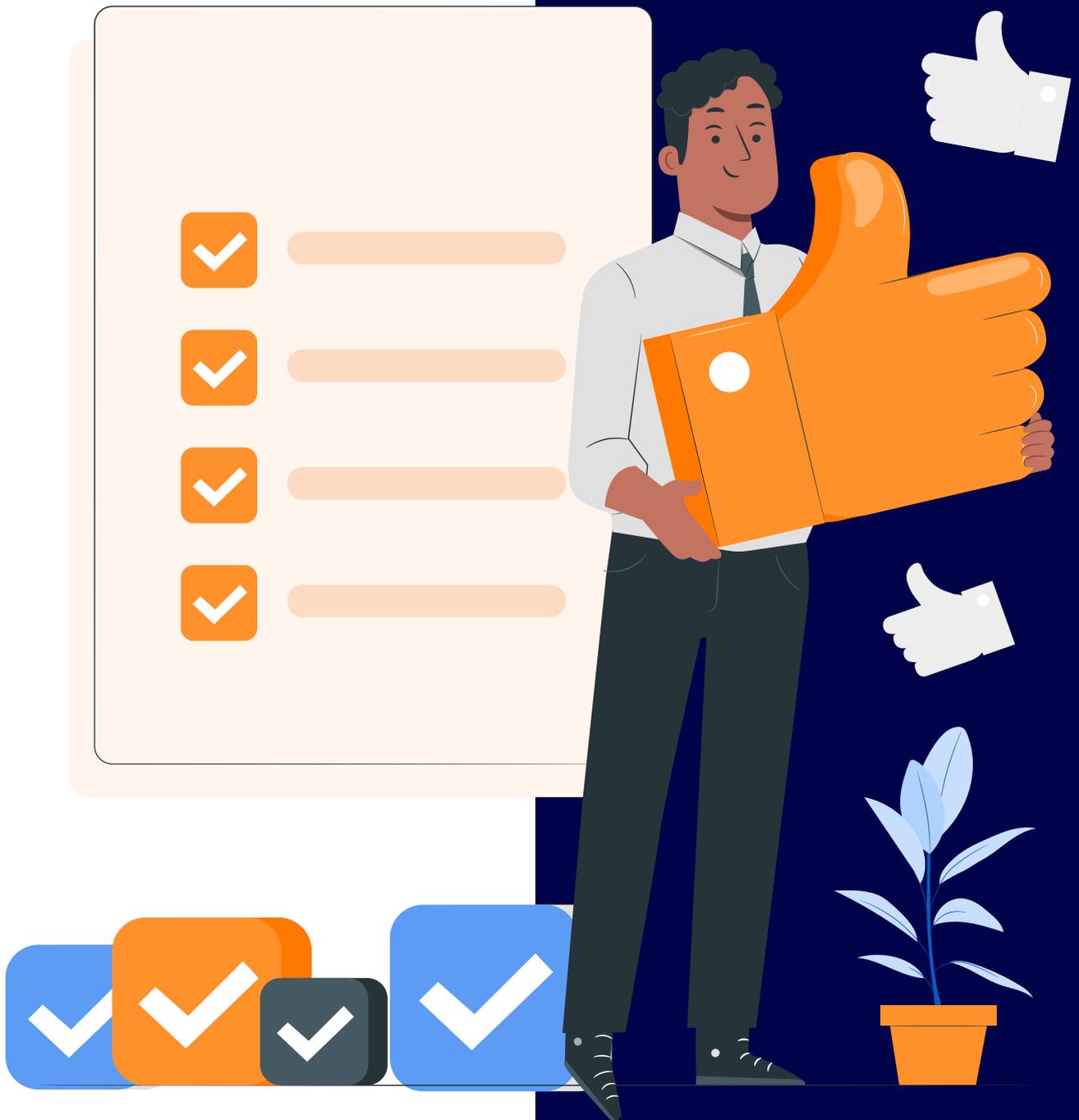
Atas kondisi kebebasan sipil di dalam negeri, CIVICUS menilai Indonesia sebagai “obstructed”. Penilaian ini adalah kondisi dimana “ruang sipil sangat diperebutkan oleh para pemegang kekuasaan dan menghambat pemenuhan hak-hak dasar”. Meskipun organisasi masyarakat sipil ada,

⁵⁹ IDEA, I. (2021, December 31). The Global State of Democracy Indices . Retrieved from nternational Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA): <https://www.idea.int/gsod-indices/democracy-indices>

⁶⁰ Antara. (2022, January 25). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 naik tipis 1 poin menjadi 38*. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/2664137/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-naik-tipis-1-poin-menjadi-38>

namun otoritas negara melemahkan mereka, termasuk melalui penggunaan pengawasan ilegal, pelecehan birokrasi dan pernyataan publik yang merendahkan. Warga negara dapat mengorganisir dan berkumpul secara damai tetapi mereka rentan terhadap penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh lembaga penegak hukum, termasuk peluru karet, gas air mata, dan pentungan. Ada beberapa ruang untuk media non-negara dan independensi editorial, tetapi jurnalis menghadapi risiko serangan fisik dan tuduhan pencemaran nama baik, yang mendorong penyensoran diri⁶¹.”

⁶¹ CIVICUS. (2022, May 19). *Indonesia*. Retrieved from Monitor Tracking Civic Space: <https://monitor.civicus.org/country/indonesia/>



BAB 4

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Indonesia masih membutuhkan kerja luar biasa untuk dapat memenuhi target SDGs, khususnya pasca pandemi COVID-19. Perbaikan yang didorong baik dalam pilar sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola seharusnya dapat di akselerasi dengan lebih cepat sehingga tidak terjebak dalam metode “*business as usual*”

Berdasarkan kuesioner yang diisi oleh 66 CSO di Indonesia, kemajuan upaya pencapaian 17 SDGs di Indonesia yaitu 39 atau masuk dalam kategori “Kemajuan Rendah”. Pencapaian ini lebih rendah apabila dibandingkan penilaian People’s Scorecard tahun lalu, dimana Indonesia berada dalam kategori “Medium”. Rencana Aksi SDGs, Strategi & Anggaran mendapatkan penilaian paling tinggi (45). Pencapaian ini disusul oleh implementasi di tingkat nasional (43) dan kerangka kebijakan (42). Disisi lain, Indonesia masih perlu mendorong monitoring dan evaluasi yang mendapatkan nilai terendah yaitu 32. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat gap antara rencana aksi dan proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan.

Dalam konteks kebijakan, Pemerintah baru saja menyelesaikan Rencana Aksi Nasional SDGs 2021-2024 yang melibatkan 132 institusi, Rencana Aksi Daerah (RAD) di 31 dari total 37 provinsi serta regulasi terbaru untuk mendorong SDGs di tingkat desa melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pencapaian SDGs.

Dalam periode 2019-2021, mayoritas kebijakan (UU, INPRES, PERPRES) yang disusun untuk mendorong pilar pembangunan sosial (1, 2, 3, 4, 5) sebanyak 13 buah, diikuti pilar pembangunan lingkungan (6, 11, 12, 13, 14, 15) sebanyak 6 buah, pilar pembangunan ekonomi (7, 8, 9, 10, 17) sebanyak 4 buah, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola (16) sebanyak 3 buah. Khususnya dalam pilar lingkungan, kebijakan yang dihasilkan kurang konsisten untuk

dalam pilar lingkungan, kebijakan yang dihasilkan kurang konsisten untuk menahan suhu bumi dibawah 1,5 derajat celcius sesuai Perjanjian Paris yang telah diratifikasi dalam hukum nasional UU Nomor 16 Tahun 2016.

Berdasarkan tren data capaian 19 indikator yang ditinjau, 13 indikator mengalami kemajuan (hijau), sedangkan 6 lainnya mengalami kemunduran (merah). Walaupun masih perlu ditinjau secara kuantitatif korelasinya, setidaknya data ini memberikan informasi bahwa kebijakan pemerintah selama 5 tahun belakangan telah berdampak terhadap kemajuan beberapa indikator SDGs secara positif dan negatif (trade off).

Kebutuhan pendanaan untuk SDGs mencapai Rp 67 ribu triliun dengan gap kebutuhan pendanaan sekitar Rp 14 ribu triliun. Gap ini diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 70% dengan menggunakan *benchmark* pendanaan SDGs global akibat pandemi COVID-19. Terlepas dari berbagai inisiatif pembiayaan SDGs, **belum ada dana khusus yang dapat diakses oleh masyarakat sipil untuk mendorong implementasi SDGs**

Sejalan dengan riset-riset sebelumnya, lokalisasi SDGs terhambat komitmen, data dan kapasitas pemerintah daerah untuk mendorong pencapaian SDGs yang multipihak. Berdasarkan survei, ada gap pengetahuan untuk rencana aksi nasional (89%) dan rencana aksi daerah (73%), dimana keduanya merupakan mandat dari Perpres SDGs.

Untuk monitoring dan evaluasi di tingkat internasional, Indonesia telah menyusun *Voluntary National Review* (VNR) sebanyak 3 kali (2017, 2019, 2021) dan berencana untuk melakukannya kembali pada tahun 2023. Pemerintah juga telah menyusun hasil dari pemantauan dan evaluasi atas progres dan pencapaian TPB/SDGs, yang targetnya ditetapkan pada RAN 2017-2019 pada tahun 2019.

Kuesioner menunjukkan bahwa kesadaran publik merupakan indikator kedua dengan nilai terendah. Hal ini sejalan dengan riset sebelumnya dimana masyarakat secara umum belum banyak yang tahu tentang SDGs, seperti nelayan, pedagang pasar, sopir, dan komunitas perempuan. Informasi tentang SDGs masih menjadi pengetahuan terbatas di kalangan pemerintah daerah, CSO, akademisi, dan mahasiswa.

Menyisakan delapan tahun, kerjasama multipihak untuk mendorong SDGs perlu diperkuat, khususnya dengan CSO. Berdasarkan kuesioner, 82%

responden CSO menganggap terbatasnya informasi untuk terlibat menjadi hambatan untuk mendorong implementasi SDGs. Hambatan lainnya yaitu anggaran (76%), Advokasi kebijakan dengan pemerintah (70%), Pengumpulan data dan money (55%) serta pengetahuan mengenai SDGs (30%)

SDGs di satu sisi telah membantu menstruktur kerja CSO, serta menjadi sumber legitimasi dan peluang memperkuat kolaborasi multipihak untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Beberapa diantaranya pemetaan partisipatif masyarakat adat berbasis gender oleh Perempuan AMAN, pemberdayaan disabilitas oleh HWDI, membantu pemerintah daerah untuk mengintegrasikan SDGs dalam RPJMD oleh Migrant CARE Jember, mengurangi *Stunting* dengan pendekatan berbasis gender oleh Kalyanamitra serta memastikan perlindungan jurnalis dan akses terhadap data oleh AJI.

Apabila ditinjau per tujuan, tujuan yang mendapatkan nilai paling tinggi menurut responden adalah tujuan 4 (46) dan tujuan 5 (45). Sementara tujuan yang mendapatkan nilai paling rendah adalah tujuan 10 (31) dan tujuan 7 (34)

Dalam implementasinya, walaupun tetap ada berbagai tantangan, Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam angka partisipasi pendidikan. Indonesia juga baru mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), hasil kerjasama berbagai pihak selama 10 tahun pada sidang paripurna DPR RI ke-19 pada April 2022.

Sementara di satu sisi, kemajuan dalam sektor energi dan isu ketimpangan perlu komitmen yang lebih kuat. Pemerintah Indonesia dinilai tidak konsisten dalam menurunkan emisi karbon dan transisi energi baru terbarukan (EBT) karena ketergantungan yang tinggi terhadap batu bara. Ketimpangan pendapatan di Indonesia juga semakin melebar, walaupun pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, angka pengangguran dan gini index Indonesia sudah mulai membaik seiring dengan meningkatnya mobilitas dan konsumsi masyarakat pasca COVID-19 yang melandai.

Responden menilai bahwa kelompok rentan dan *left behind* diasosiasikan pada kelompok anak-anak. Menurut responden, 66% Anak-anak rentan dan tertinggal dalam pembangunan, diikuti perempuan dan anak perempuan

(62%) dan penyandang disabilitas (58%). Dalam mekanisme HAM internasional untuk Indonesia, perempuan dan anak perempuan serta anak-anak juga mendapatkan rekomendasi terbanyak yaitu 273 dan 213 secara berurutan.

Rekomendasi

1. Berdasarkan kuesioner, responden masyarakat sipil meminta agar pemerintah dapat fokus untuk merevisi/memperbaiki Kerangka Regulasi untuk mengakselerasi SDGs (92%), Kolaborasi Multipihak (86%), Budget (83%), Inklusivitas (67%), dan Komunikasi Publik SDGs (64%)
2. Pemerintah diharapkan melakukan review dan menghapus undang-undang, peraturan, dan praktik-praktik kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta mendiskriminasi dan merepresi kelompok warga rentan
3. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan koherensi kebijakan SDGs antar K/L baik di tingkat nasional dan daerah dengan menyadari pentingnya bekerja secara sinergis, memahami konteks, mengidentifikasi konsekuensi negatif yang tidak diinginkan, dan secara efektif mengelola *trade-off* yang tidak dapat dihindari di seluruh SDGs.
4. Pemerintah diharapkan dapat menguatkan peran pemerintah daerah baik secara formal dan material untuk mengakselerasi implementasi SDGs di tingkat daerah
5. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Kementerian/ Lembaga tingkat pusat dan daerah mengenai SDGs, khususnya dalam penyusunan kebijakan dan budget yang efektif, partisipatif, berkelanjutan, berperspektif HAM, dan berpihak kepada kelompok rentan/terdampak.
6. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerjasama multipihak secara sinergis, bermakna dan terpadu dengan melibatkan lembaga non pemerintah, sejak dalam tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi kebijakan. Di satu sisi, CSO diharapkan lebih konsisten untuk mendorong pencapaian SDGs di Indonesia dengan

secara aktif terlibat dalam kerjasama multipihak

7. Pemerintah diharapkan dapat mengubah cara pandang/norma terhadap kelompok minoritas dengan memberikan upaya khusus, baik dalam bentuk kebijakan ataupun anggaran. Misalnya dengan memperluas praktik baik yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu pemberian E-KTP untuk transgender perempuan (transpuan)
8. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas data valid terpilah dan terpilih mengenai Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)
9. Mendorong Pengesahan Peraturan Presiden untuk Dana Abadi CSO (*Endowment Fund*) yang dilakukan secara transparan, profesional dan akuntabel agar pendanaan dapat diakses oleh CSO untuk mendorong implementasi SDGs
10. Melakukan komunikasi publik yang terkoordinasi, masif dan menyesuaikan konteks lokal untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai SDGs dan membuat masyarakat aktif terlibat dalam prosesnya
11. Memetakan kemajuan dan praktik baik yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah untuk kemudian ditampilkan dalam website SDGs Indonesia dan diberikan insentif serta dukungan agar inisiatif baik dapat memberikan inspirasi dan di *scale up* secara masif
12. Mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan komitmen negara G20 untuk mengakselerasi pencapaian SDGs dalam Presidensi G20 Indonesia
13. Memastikan pemahaman dan komitmen terhadap SDGs dijadikan tolak ukur untuk memilih kandidat presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta anggota DPD RI dalam Pemilihan Umum 2024

REFERENSI

- A4SD. (2022). Frequently Asked Questions on A4SD People's Scorecards. Retrieved from Action for Sustainable Development: <https://action4sd.org/sdg-scorecards-faq/>
- Aidha, C. N., Mawesti, D., Afrina, E., Rahmanda, N. R., Thariq, M., & Zunivar, A. Y. (2019). Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Tujuan SDGs No 1, 5 & 10: Baseline Study Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jakarta: Perkumpulan PRAKARSA. <https://repository.theprakarsa.org/media/publications/285240-kapasitas-pemerintah-daerah-dalam-mencap-b1d4b666.pdf>
- Anam, K. (2022, March 14). PT SMI Akselerasi Proyek Berbasis SDGs Lewat Platform SIO. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220314181731-4-322692/pt-smi-akselerasi-proyek-berbasis-sdgs-lewat-platform-sio>
- Antara. (2022, January 25). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 naik tipis 1 poin menjadi 38. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/2664137/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-naik-tipis-1-poin-menjadi-38>
- Asian Development Bank. (2020). Reaching the Sustainable Development Goals Through Better-Local Level Data. Manila: Asian Development Bank. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/644236/sdgs-better-local-level-data-indonesia.pdf>
- Bappenas. (2019). *Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals*. Jakarta: Kedeputusan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Climate Action Tracker. (2021, November 1). Country Summary Indonesia. Retrieved from <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/>
- CNN Indonesia. (2022, July 21). Sri Mulyani Sebut Rasio Pajak Indonesia Terendah Se-Asean dan G20. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220720102045-532-823731/sri-mulyani-sebut-rasio-pajak-indonesia-terendah-se-asean-dan-g20>
- CIVICUS. (2022, May 19). *Indonesia*. Retrieved from Monitor Tracking Civic Space: <https://monitor.civicus.org/country/indonesia/>

- Deny, S. (2017, October 30). Industri Manufaktur Bisa Jadi Andalan Tingkatkan Penerimaan Pajak. Retrieved from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3145304/industri-manufaktur-bisa-jadi-andalan-tingkatkan-penerimaan-pajak>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan. (2022, June 28). Indonesia Peringkat 5 di Dunia, Stunting Disebut Bukan Hanya Urusan Pemerintah. Retrieved from <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/828>
- Ellyvon, P. (2021, May 20). Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia . Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>
- Equal Measures 2030 (2022). Back to Normal is Not Enough: the 2022 SDG Gender Index. Retrieved from <https://www.equalmeasures2030.org/2022-sdg-gender-index/>
- Handrian, E., & Andry, H. (2020, April 13). Sustainable Development Goals : Tinjauan Percepatan Pencapaian Di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87. <https://core.ac.uk/download/pdf/322503307.pdf>
- IDEA, I. (2021, December 31). The Global State of Democracy Indices . Retrieved from International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA): <https://www.idea.int/gsod-indices/democracy-indices>
- INFID. (2019). *Studi Keterbukaan Pemerintah dalam Rangka Mendorong Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Daerah*. Jakarta: INFID.
- INFID. (2019). *Penilaian Fiskal dalam Rangka Pelaksanaan dan Pencapaian SDGs yang Berperspektif Gender, Inklusif, dan Transformatif* . Jakarta: INFID.
- Iswara, M. A. (2022, January 27). Kemiskinan Ekstrem 0% di Indonesia, Realita Atau Utopia Belaka? Baca selengkapnya di artikel “Kemiskinan Ekstrem 0% di Indonesia, Realita Atau Utopia Belaka?”. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/goej>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2021, April 15). Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia Penting bagi Kemajuan Bangsa. Retrieved from <https://www.kemendikbud.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa>
- Kementerian PUPR. (2020, July 3). *Segara Rampung, SPAM Umbulan Tambah Pasokan Air Bersih Bagi 1,3 Juta Warga Jatim*. Retrieved from Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik

Indonesia:<https://pu.go.id/berita/segera-rampung-spam-umbulan-tambah-pasokan-air-bersih-bagi-1-3-juta-warga-jatim>

Kumparan Sains. (2018, March 28). Angka Kematian Ibu dan Bayi Indonesia Tertinggi Kedua di Asia Tenggara. Retrieved from <https://kumparan.com/kumparansains/angka-kematian-ibu-dan-bayi-indonesia-tertinggi-kedua-di-asia-tenggara>

Mazrieva, E. (2022, February 22). Mengapa Perempuan Tak Kunjung Capai Kuota 30% di DPR? Retrieved from VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-perempuan-tak-kunjung-capai-kuota-30-di-dpr-/6452476.html>

Ngoyo, M. F. (2018, March 8). Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan. *Sosioreligius*, 1(1). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/593198>

Rabbi, C. P. (2021, December 20). Pendanaan SDGs Butuh Rp 67 Ribu Triliun, Swasta Diminta Terlibat Retrieved from Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/maesaroh/berita/61c0467254d98/pendanaan-sdgs-butuh-rp-67-ribu-triliun-swasta-diminta-terlibat>

Republic of Indonesia. (2021). *Indonesia's Voluntary National Review 2021*. Jakarta.

SDSN. (2022, June 2). Sustainable Development Report 2022. Retrieved from Sustainable Development Report: <https://www.sdgindex.org/reports/sustainable-development-report-2022/>

Reza, M. (2021, May 10). *SDGs Desa dan Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*. Retrieved from Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: <https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/sdgs-desa-dan-rekonstruksi-paradigma-pembangunan-berkelanjutan/>

Seers, D. (1972). What are we trying to Measure? *The Journal of Development Studies*, 8(3), 21-36. <https://www.tandfonline.com/doi/ref/10.1080/00220387208421410?scroll=top>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022, June 14). Presiden Jokowi Keluarkan Inpres 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Retrieved from <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-keluarkan-inpres-4-2022-tentang-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem/>

Sekretariat Nasional SDGs. (n.d.). Dokumen. Retrieved from https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf

- Sekretariat SDGs Indonesia. (n.d.). Struktur Organisasi SDGs di Indonesia. Retrieved from <https://sdgs.bappenas.go.id/struktur-organisasi/>
- Sekretariat Wakil Presiden. (2022, May 11). Tahun 2022 Angka Prevalensi Stunting Harus Turun Setidaknya 3%. Retrieved from <https://stunting.go.id/tahun-2022-angka-prevalensi-stunting-harus-turun-setidaknya-3/>
- Sofianto, A. (2019, June 28). Integrasi Target dan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Jawa Tengah. *Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 17(1), 25-41. <http://ejournal.bappeda.jatengprov.go.id/index.php/jurnaljateng/article/view/784>
- Syahni, D. (2021, October 7). Gugat UU Minerba, Upaya Kurangi Beban Lingkungan dan Masyarakat. Retrieved from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2021/10/07/gugat-uu-minerba-upaya-kurangi-beban-lingkungan-dan-masyarakat/>
- The Danish Institute for Human Rights. (n.d.). Indonesia. Retrieved from SDG - Human Rights Data Explorer: <https://sdgdata.humanrights.dk/en/sdg/report/country/883>
- United Nations. (2012, April 23). Our Struggle for Global Sustainability Will Be Won or Lost in Cities. Retrieved from United Nations: <https://press.un.org/en/2012/sgsm14249.doc.htm>
- Winarto, Y. (2018, December 3). Sektor manufaktur berpotensi besar serap bonus demografi. Retrieved from Kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/sektor-manufaktur-berpotensi-besar-serap-bonus-demografi>
- World Economy Forum (2021, April 20) Fostering Effective Energy Transition 2021 edition. Retrieved from <https://www.weforum.org/reports/fostering-effective-energy-transition-2021/>

Lampiran 1 Indonesia dalam International Ranking

SDG Index: 82/163 (SDR, 2022)

Civic Space: OBSTRUCTED (CIVICUS, 2022)

Climate Action Tracker: Highly Insufficient (Nov 2021)

Energy Transition Index: 71/115 (WEF, 2021)

Democracy: Flawed Democracy, ranked 52/167 (EIU 2021)

Democracy: Weak/low performance (IDEA, 31 December 2021)

Human Development index 2019: 0.718, ranked 107/189

Gender Equality Index (GEI): ranked 101/156 (2021)

SDGs Gender Index: ranked 76/144 (2022)

VNR 2017, 2019, 2021, 2023 (Upcoming)

UPR: 2008, 2012, 2017, 2022 (Upcoming)

Lampiran 2 Pedoman Penilaian People's Scorecard 2022

	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
	Kemunduran Sangat Signifikan	Kemunduran Signifikan	Kemunduran Sedang	Kemunduran Terbatas	Kemunduran Sangat Terbatas	Tidak ada kemajuan/kemunduran	Kebijakan/Rencana sedang dibahas	Tahap Perencanaan	Rencana atau Tindakan Dimulai	Implementasi sedang berlangsung	Implementasi Berhasil
Rencana Pembangunan Nasional untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Strategi & Anggaran	Rencana aksi dan strategi telah dibatalkan atau diubah secara mendasar	Rencana aksi tidak hanya belum diimplementasikan, tetapi dapat diabaikan atau diubah secara mendasar	Rencana aksi dan strategi belum diimplementasikan atau didanai	Strategi, rencana dan anggaran tersedia, tetapi tidak mendorong perumusan kebijakan atau anggaran	Strategi, rencana aksi, dan anggaran tersedia, tetapi sebagian diimplementasikan atau didanai		Strategi, rencana aksi dan anggaran sedang dibahas	Strategi rencana aksi dan anggaran dalam fase perencanaan	Strategi, rencana aksi, dan anggaran disetujui dan mulai mendorong pengembangan kebijakan publik	Strategi, rencana aksi, dan anggaran berhasil mengimplementasikan pendanaan yang stabil untuk kebijakan publik, yang sepenuhnya selaras dengan pencapaian SDGs	Strategi, rencana aksi, dan anggaran berhasil mengimplementasikan pendanaan yang stabil untuk kebijakan publik, yang sepenuhnya selaras dengan pencapaian SDGs
Kerangka kebijakan dan hukum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Implementasi kebijakan/kerangka hukum telah ditinggalkan atau diubah secara mendasar	Kerangka kebijakan/hukum tidak hanya belum diimplementasikan, namun juga dapat ditinggalkan atau diubah secara mendasar	Kerangka kebijakan/hukum belum ada	Kerangka kebijakan/hukum belum diimplementasikan sebagian	Kerangka kebijakan/hukum tersedia, tetapi belum mulai diterapkan dan/atau tidak selaras dengan prinsip-prinsip SDGs		Kerangka kebijakan dan hukum mulai dibahas/ditinjau ulang	Kerangka kebijakan dan hukum dalam tahap perencanaan	Kerangka kebijakan dan hukum disetujui dan mulai diterapkan	Kerangka kebijakan dan hukum yang kuat dan sukses dilaksanakan dan memiliki dampak positif	Kerangka kebijakan/hukum yang kuat dan sukses dilaksanakan dan memiliki dampak positif secara efektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip SDG
Lembaga dengan mandat yang jelas	Instansi pemerintah tidak memberikan	Dukungan pemerintah telah menurun	Dukungan pemerintah di lapangan sudah mulai	Dukungan pemerintah terpecah-pecah	Indikator statistik menunjukkan bahwa		Instansi pemerintah dengan mandat yang jelas	Instansi pemerintah merencanakan	Instansi pemerintah mendukung implementasi	Instansi pemerintah mendukung implementasi	Instansi pemerintah mendukung implementasi

	dukungan apapun untuk implementasi SDG	drastis	berkurang	antara wilayah dan lembaga	kemajuan SDG ini mulai mundur			keterlibatan mereka	beberapa target	semua target	SDGs secara efektif dan memiliki mekanisme untuk nte-grasi lintas sektoral kebijakan publik
Implementasi di Tingkat Nasional	Indikator statistik menunjukkan bahwa SDG telah benar-benar mundur	Indikator statistik menunjukkan bahwa SDG telah menurun secara signifikan	Indikator statistik menunjukkan bahwa implementasi SDG mulai menurun.	Indikator statistik menunjukkan bahwa kemajuan SDG terancam menurun	Indikator statistik menunjukkan bahwa kemajuan pada SDG mulai terancam		Indikator statistik menunjukkan bahwa kemajuan pada SDG moderat	Indikator statistik menunjukkan bahwa SDG ini berada di jalur yang tepat untuk dicapai	Indikator statistik menunjukkan bahwa TPB ini sedang dicapai.	Indikator statistik menunjukkan bahwa TPB ini sedang dicapai.	Indikator statistik menunjukkan bahwa TPB ini sedang dicapai.
Implementasi di tingkat sub-nasional (Daerah)	Tidak ada rencana pelokalan SDG di kota/daerah mana pun yang sedang dilaksanakan	Rencana pelokalan SDG ditinggalkan atau diubah secara mendasar	Pelokalan SDG telah dikurangi	Rencana pelokalan untuk SDG terancam dikurangi	Rencana pelokalan SDG bahkan tidak dibahas		Pelokalan SDGs dalam tahap perencanaan di kota/daerah tertentu	Rencana pelokalan mulai diterapkan di kota/daerah.	Implementasi rencana lokalisasi berjalan lancar di kota/daerah	Implementasi rencana lokalisasi berjalan lancar di kota/daerah	Rencana lokalisasi SDG berhasil diterapkan di sebagian besar kota/daerah dengan rencana khusus
Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Kerangka kerja pemantauan evaluasi dan pelaporan tidak ada sama sekali	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan telah dit-inggalkan atau diubah secara mendasar	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan telah dikurangi	Kerangka kerja pemantauan, evaluasi dan pelaporan telah didiskusikan, tetapi tidak disusun	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hanya dilaksanakan secara terbatas		Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan disepakati	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sedang berlangsung pada semua target SDG tetapi secara sporadis	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan rutin pada semua target tersedia dan masyarakat sipil dapat berpartisipasi penuh	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sedang berlangsung pada semua target SDG tetapi secara sporadis	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan rutin pada semua target tersedia dan masyarakat sipil dapat berpartisipasi penuh

	dukungan apapun untuk implementasi SDG	drastis	berkurang	antara wilayah dan lembaga	kemajuan SDG ini mulai mundur			keterlibatan mereka	beberapa target	semua target	SDGs secara efektif dan memiliki mekanisme untuk nte-grasi lintas sektoral kebijakan publik
Implementasi di Tingkat Nasional	Indikator statistik menunjukkan bahwa SDG telah benar-benar mundur	Indikator statistik menunjukkan bahwa SDG telah menurun secara signifikan	Indikator statistik menunjukkan bahwa implementasi SDG mulai menurun.	Indikator statistik menunjukkan bahwa kemajuan SDG terancam menurun	Indikator statistik menunjukkan bahwa kemajuan pada SDG mulai terancam	Indikator statistik menunjukkan bahwa kemajuan SDG minimal	Indikator statistik menunjukkan bahwa kemajuan pada SDG moderat	Indikator statistik menunjukkan bahwa SDG mengalami kemajuan dengan tren positif	Indikator statistik menunjukkan bahwa SDG ini berada di jalur yang tepat untuk dicapai	Indikator statistik menunjukkan bahwa TPB ini sedang dicapai.	Indikator statistik menunjukkan bahwa TPB ini sedang dicapai.
Implementasi di tingkat sub-nasional (Daerah)	Tidak ada rencana pelokalan SDG di kota/daerah mana pun yang sedang dilaksanakan	Rencana pelokalan SDG ditinggalkan atau diubah secara mendasar	Pelokalan SDG telah dikurangi	Rencana pelokalan untuk SDG terancam dikurangi	Rencana pelokalan SDG bahkan tidak dibahas	Pelokalan SDG sedang dibahas di kota/daerah	Pelokalan SDGs dalam tahap perencanaan di kota/daerah tertentu	Rencana pelokalan mulai diterapkan di kota/daerah.	Implementasi rencana lokalisasi berjalan lancar di kota/daerah	Implementasi rencana lokalisasi berjalan lancar di kota/daerah	Rencana lokalisasi SDG berhasil diterapkan di sebagian besar kota/daerah dengan rencana khusus
Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Kerangka pemantauan evaluasi dan pelaporan telah ditinjau atau diubah secara mendasar	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan telah ditinjau atau diubah secara mendasar	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan telah dikurangi	Kerangka pemantauan, evaluasi dan pelaporan telah didiskusikan, tetapi tidak disusun	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan ada tetapi hanya dilaksanakan secara terbatas	Mekanisme untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibahas	Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan disepakati	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan mulai diimplementasikan dan target tidak tercapai sebagian dimasukkan	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sedang berlangsung pada semua target SDG tetapi secara sporadis	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan rutin pada semua target tersedia dan masyarakat sipil dapat berpartisipasi penuh	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan rutin pada semua target tersedia dan masyarakat sipil dapat berpartisipasi penuh

Transparansi & Akuntabilitas	Mekanisme transparansi dan akuntabilitas telah ditinggalkan	Mekanisme transparansi dan akuntabilitas sebagian besar ditinggalkan dan/atau tidak lengkap	Mekanisme transparansi dan akuntabilitas telah dikurangi	Mekanisme transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya diterapkan	Mekanisme transparansi dan akuntabilitas telah didiskusikan, tetapi tidak dilaksanakan	Mekanisme transparansi dan akuntabilitas	Perencanaan awal mekanisme transparansi dan akuntabilitas	Beberapa mekanisme transparansi dan akuntabilitas telah	Mekanisme transparansi dan akuntabilitas sedang dilaksanakan	Mekanisme transparansi dan akuntabilitas secara solid dan teratur
Kesadaran Publik & Pengembangan Kapasitas	Peningkatan kesadaran dan penggunaan kapasitas tidak ada dalam rencana	Peningkatan kesadaran dan penggunaan kapasitas belum dilaksanakan secara men- dasar	Peningkatan kesadaran dan penggunaan kapasitas telah dikurangi	Peningkatan kesadaran dan penggunaan kapasitas belum dilaksanakan	Peningkatan kesadaran dan penggunaan kapasitas telah dilaksanakan secara selektif atau terbatas	Peningkatan kesadaran dan penggunaan kapasitas telah didiskusikan	Ada perencanaan peningkatan kesadaran dan kebutuhan pengembangan kapasitas	Peningkatan kesadaran dan penggunaan kapasitas tersedia	Kegiatan peningkatan kesadaran dan penggunaan kapasitas sedang berlangsung	Tersedia peningkatan kesadaran dan pembangunan kapasitas yang kuat
Kemitraan Multipihak	Kemitraan multipihak kepentingan telah ditinggalkan	Kemitraan digunakan dengan cara yang sangat parsial dan non-partisipatif	Kemitraan belum digunakan secara konsisten untuk SDG	Kemitraan multipihak sangat lambat dalam penerapannya	Kemitraan dengan Negara-negara Anggota dibahas tetapi tidak dilakukan	Kemitraan multipihak sedang dibahas	Kemitraan multipihak dalam tahap perencanaan	Kemitraan dalam tahap awal implementasi	Kemitraan masuk dalam kerangka kerja dan menghasilkan efek yang konkret dan positif	Kemitraan multipihak diimplementasikan dengan sukses dan secara partisipatif
Partisipasi Masyarakat Sipil	Partisipasi tidak ada	Partisipasi sangat terbatas dan tidak efektif	Partisipasi terbatas dan memiliki hasil yang terbatas (hanya sebatas partisipasi konsultatif)	Partisipasi tidak merata antar aktor dan wilayah	Ruang dan mekanisme untuk partisipasi telah didiskusikan, tetapi masih belum dilaksanakan	Ruang dan mekanisme untuk partisipasi telah didiskusikan	Ada rencana konkret untuk ruang mekanisme partisipasi yang inklusif dan substansif	Ruang mekanisme partisipasi dibentuk secara terbuka, substansial dan inklusif	Dialog inklusif berlangsung dan telah memberikan hasil positif dari segi kebijakan	Ruang mekanisme dialog politik inklusif kuat, stabil, berpengaruh, dengan hasil politik yang konkret dan positif

NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 info@infid.org www.infid.org

Follow Us :



INFID



INFID_ID

